



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Laporan Keuangan

Kantor Camat Janapria

Per 31 Desember 2024

TAHUN ANGGARAN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tahun 2024 pada Kantor Camat Janapria Kabupaten Lombok Tengah dapat disusun dan disajikan dengan baik.

Laporan keuangan ini disusun sebagai bentuk tanggung jawab dan akuntabilitas Kantor Camat Janapria dalam pengelolaan keuangan daerah. Penyajian laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas, akurat, dan transparan mengenai posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan perangkat daerah selama periode laporan.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan keuangan adalah proses yang memerlukan ketelitian dan keterbukaan. Oleh karena itu, laporan ini telah disusun dengan penuh kehatian dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bimbingan yang berharga dalam penyusunan laporan ini.

Kami berharap laporan keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna dan memenuhi harapan semua pihak yang berkepentingan. Masukan dan saran dari berbagai pihak akan sangat kami hargai untuk penyempurnaan laporan ke depan.

Lombok Tengah, 16 Januari 2025

PLT Camat Janapria



LALU MARZAWAN SUPRIYADI, S.Sos

NIP. 197102251994021002

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	viii
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)	1
II. NERACA.....	3
III. LAPORAN OPERASIONAL (LO)	6
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE).....	9
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK).....	11
BAB I PENDAHULUAN.....	12
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	12
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	14
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	15
BAB II KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR	
PENCAPAIAN KINERJA APBD	16
2.1 Kebijakan Keuangan.....	16
2.2 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	17
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	23
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	
Secara Umum	23
3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target	
yang Telah Ditetapkan.....	24
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	25
4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan SKPD	25
4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan	
Keuangan SKPD.....	25
4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan	
Keuangan SKPD.....	26

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan SKPD	29
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	39
5.1 Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	39
5.2 Pos-pos Neraca	45
5.3 Pengungkapan atas Pos Aset dan Kewajiban	45
5.4 Pos-pos Laporan Operasional	53
5.5 Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	59
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN	61
6.1 Gambaran Umum Dinas Perhubungan	61
6.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan	62
BAB VII PENUTUP	65
LAMPIRAN	53

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 2.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Kantor Camat Janapria Tahun 2024	16
Tabel 2.2 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kantor Camat Janapria Tahun 2024	18
Tabel 2.3 Realisasi Program dan Kegiatan APBD Kantor Camat Janapria Tahun 2024...	19
Tabel 3.1 Pencapaian Realisasi Anggaran Tahun 2024.....	23
Tabel 5.11 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi.....	39
Tabel 5.12 Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai.....	39
Tabel 5.13 Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa	40
Tabel 5.14 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal	41
Tabel 5.15 Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43
Tabel 5.17 Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	43
Tabel 5.21 Rekapitulasi Perhitungan Surplus/(Defisit) LRA	44
Tabel 5.29 Rincian Aset.....	45
Tabel 5.50 Persediaan	45
Tabel 5.52 Daftar Nilai Aset Tetap	46
Tabel 5.53 Daftar Nilai Aset Tetap Tanah	46
Tabel 5.55 Aset Tetap Peralatan dan Mesin.....	47
Tabel 5.56 Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2024	47
Tabel 5.57 Aset Tetap Gedung dan Bangunan.....	48
Tabel 5.59 Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi	48
Tabel 5.60 Penambahan dan Pengurangan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024.	49
Tabel 5.64 Daftar Aset Lainnya	49
Tabel 5.65 Rincian Kewajiban.....	50
Tabel 5.66 Rincian Kewajiban Jangka Pendek	50
Tabel 5.69 Rincian Utang Belanja	51
Tabel 5.70 Rincian Utang Belanja Pegawai	52
Tabel 5.71 Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa.....	52
Tabel 5.91 Penjelasan Selisih Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO	52
Tabel 5.92 Rincian Beban.....	52
Tabel 5.93 Rincian Beban Operasional.....	53
Tabel 5.94 Rincian Beban Pegawai	53
Tabel 5.96 Rincian Beban Barang dan Jasa	53

Tabel 5.105 Rincian Beban Peenyusutan dan Amortisasi	55
Tabel 5.111 Rekapitulasi Perhitungan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	56
Tabel 5.116 Rincian Surplus/(Defisit) – LO	56
Tabel 5.131 Ekuitas Awal - LO	58
Tabel 5.132 Surplus/(Defisit)-LO	58
Tabel 5.141 Rincian Ekuitas Akhir	59

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	:	Jurnal Penyesuaian/Jurnal Umum 1 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024
Lampiran 2	:	Berita Acara Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD Tahun 2024
Lampiran 3	:	Berita Acara Opname Persediaan dan Daftar Persediaan Per 31 Desember 2024
Lampiran 4	:	Berita Acara Penutupan Kas Per 31 Desember 2024
Lampiran 5	:	Kertas Kerja Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2024
Lampiran 6	:	Kertas Kerja Penambahan dan Pengurangan Kewajiban Per 31 Desember 2024 : a. Daftar Utang Pegawai Per 31 Desember 2024 b. Daftar Utang Barang dan Jasa Per 31 Desember 2024
Lampiran 7	:	Laporan Keuangan SKPD Rinci sd Level 6 (LRA, LO, Neraca, LPE)

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Perangkat Daerah Kantor Camat Janapria Kabupaten Lombok Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai dan isinya telah menyajikan pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak dan bebas salah saji yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Lombok Tengah, 16 Januari 2025

PLT Camat Janapria



LALU MARZAWAN SUPRIYADI, S.Sos

NIP. 197102251994021002



PEMERINTAH KABUPATEN
LOMBOK TENGAH

Kantor Camat Janapria
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Per 31 Desember 2024 dan 2023



PEMERINTAHAN KAB. LOMBOK TENGAH
KANTOR CAMAT JANAPRIA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024
01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	$5 = \frac{(4/3) * 100}{100}$	6
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
4.1.01	Pajak Daerah				
4.1.02	Retribusi Daerah				
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah				
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	JUMLAH PENDAPATAN				
5	BELANJA DAERAH	3,018,630,153.00	2,942,255,350.83	97.47%	2,816,847,974.00
5.1	BELANJA OPERASI	2,912,093,998.00	2,835,900,030.83	97.38%	2,753,934,174.00
5.1.01	Belanja Pegawai	2,147,278,931.00	2,091,994,627.00	97.43%	2,058,634,309.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	764,815,067.00	743,905,403.83	0.9727	695,299,865.00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	2,912,093,998.00	2,835,900,030.83	97.38%	2,753,934,174.00
5.2	BELANJA MODAL	106,536,155.00	106,355,320.00	0.9983	62,913,800.00
5.2.01	Belanja Modal Tanah				
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	105,018,755.00	104,838,320.00	0.9983	62,913,800.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan				
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1,517,400.00	1,517,000.00	1.00	0.00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya				
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya				
	JUMLAH BELANJA MODAL	106,536,155.00	106,355,320.00	0.9983	62,913,800.00
	JUMLAH BELANJA	3,018,630,153.00	2,942,255,350.83	0.97	2,816,847,974.00
	SURPLUS/DEFISIT	-3,018,630,153.00	-2,942,255,350.83	-0.97	-2,816,847,974.00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN				

Lombok Tengah, 16 Januari 2025

PLT Camat Janapria



LALU MARZAWAN SUPRIYADI, S.Sos
NIP. 197102251994021002



PEMERINTAH KABUPATEN
LOMBOK TENGAH

Kantor Camat Janapria

NERACA

Per 31 Desember 2024 dan 2023



PEMERINTAHAN KAB. LOMBOK TENGAH
KANTOR CAMAT JANAPRIA
Neraca



Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1	ASET	9,249,026,346.00	9,244,897,348.00
1.1	ASET LANCAR	353,000.00	420,436.00
1.1.01	Kas dan Setara Kas		
1.1.01.02	Kas di Bendahara Penerimaan		
1.1.01.03	Kas di Bendahara Pengeluaran		
1.1.01.04	Kas di BLUD		
1.1.01.05	Kas Dana BOS		
1.1.01.06	Kas Dana Kapitasi pada FKTP		
1.1.01.07	Kas Lainnya		
1.1.01.10	Kas Dana BOSP		
1.1.01.11	Kas Dana BOK Puskesmas		
1.1.03	Piutang Pajak Daerah		
1.1.04	Piutang Retribusi Daerah		
1.1.06	Piutang Lain-lain PAD yang Sah		
1.1.09	Piutang Lainnya		
1.1.10	Penyisihan Piutang		
1.1.11	Beban Dibayar Dimuka		
1.1.12	Persediaan	353,000.00	420,436.00
	JUMLAH ASET LANCAR	353,000.00	420,436.00
1.3	ASET TETAP	9,234,126,786.00	9,229,930,352.00
1.3.01	Tanah	8,266,952,000.00	8,266,952,000.00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	1,038,947,770.00	934,109,450.00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	1,257,173,000.00	1,257,173,000.00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	15,704,500.00	14,187,500.00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	-	-
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(1,344,650,484.00)	(1,242,491,598.00)
	JUMLAH ASET TETAP	9,234,126,786.00	9,229,930,352.00
	JUMLAH DANA CADANGAN		
1.5	ASET LAINNYA	14,546,560.00	14,546,560.00
1.5.03	Aset Tidak Berwujud		
1.5.04	Aset Lain-lain	14,546,560.00	14,546,560.00
	JUMLAH ASET LAINNYA	14,546,560.00	14,546,560.00
	JUMLAH ASET	9,249,026,346.00	9,244,897,348.00
2	KEWAJIBAN	48,197,110.00	48,603,044.00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	48,197,110.00	48,603,044.00
2.1.01	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
2.1.05	Pendapatan Diterima Dimuka		

2.1.06	Utang Belanja	48,197,110.00	48,603,044.00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	48,197,110.00	48,603,044.00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	JUMLAH KEWAJIBAN		
3	EKUITAS	9,200,829,236.00	9,196,294,304.00
3.1	EKUITAS	9,200,829,236.00	9,196,294,304.00
3.1.01	Ekuitas	9,200,829,236.00	9,196,294,304.00
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan		
	JUMLAH EKUITAS	9,200,829,236.00	9,196,294,304.00
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	9,249,026,346.00	9,244,897,348.00

Lombok Tengah, 16 Januari 2025
 PLT Camat Janapria



LALU MARZAWAN SUPRIYADI, S.Sos
 NIP. 197102251994021002



PEMERINTAH KABUPATEN
LOMBOK TENGAH

Kantor Camat Janapria
LAPORAN OPERASIONAL
Per 31 Desember 2024 dan 2023



PEMERINTAHAN KAB. LOMBOK TENGAH
KANTOR CAMAT JANAPRIA
LAPORAN OPERASIONAL
Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023



Dalam Rupiah

KODE REKENING	URAIAN	2024	2023	KENAIKAN / PENURUNAN	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
7	PENDAPATAN				
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO				
7.1.01	Pajak Daerah-LO				
7.1.02	Retribusi Daerah-LO				
7.1.04	Lain-lain PAD yang Sah-LO				
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO				
	JUMLAH PENDAPATAN				
8	BEBAN	2,937,720,418.83	2,870,170,488.00	67,549,930.83	
8.1	BEBAN OPERASI	2,937,720,418.83	2,870,170,488.00	67,549,930.83	
8.1.01	Beban Pegawai	2,091,167,393.00	2,067,394,417.00	23,772,976.00	
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	744,394,139.83	693,738,585.00	50,655,554.83	
8.1.07	Beban Penyisihan Piutang				
	JUMLAH BEBAN OPERASI	2,937,720,418.83	2,870,170,488.00	67,549,930.83	
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	102,158,886.00	109,037,486.00	(6,878,600.00)	
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	80,653,559.00	87,532,160.00	(6,878,600.00)	
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	21,150,639.00	21,150,638.00	0	
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	354,688.00	354,688.00	0	
8.1.08.09	Beban Penyusutan Properti Investasi				
	JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi	102,158,886.00	109,037,486.00	(6,878,600.00)	
	JUMLAH BEBAN				
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(2,937,720,418.83)	-2,870,170,488.00	(67,549,930.83)	
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL					
7.4	SURPLUS NON OPERASIONAL-LO				
7.4.03	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO				
	JUMLAH SURPLUS NON OPERASIONAL-LO				
8.4	DEFISIT NON OPERASIONAL-LO				
8.4.03	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO				
	JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL-LO				
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				

	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA				
POS LUAR BIASA					
8.5	BEBAN LUAR BIASA				
	JUMLAH BEBAN LUAR BIASA				
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(2,937,720,418.83)	-2,870,170,488.00	(67,549,930.83)	

Lombok Tengah, 16 Januari 2025
 PLT Camat Janapria



LALU MARZAWAN SUPRIYADI, S.Sos
 NIP. 197102251994021002



PEMERINTAH KABUPATEN
LOMBOK TENGAH

Kantor Camat Janapria
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Per 31 Desember 2024 dan 2023



**PEMERINTAH KAB. LOMBOK TENGAH KONSOLIDASI
KANTOR CAMAT JANAPRIA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023**



(Dalam Rupiah)

URAIAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	9,196,294,304.00	9,249,616,818.00
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	-2,937,720,418.83	-2,870,170,488.00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN		
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP		
RK PPKD	2,942,255,350.83	2,816,847,974.00
EKUITAS AKHIR	9,200,829,236.00	9,196,294,304.00

Lombok Tengah, 16 Januari 2025

PLT Camat Janapria



LALU MARZAWAN SUPRIYADI, S.Sos
NIP. 197102251994021002



PEMERINTAH KABUPATEN
LOMBOK TENGAH

Kantor Camat Janapria
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2024 dan 2023

BAB I PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan Pemerintahan Negara dan Pembangunan Nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945. Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Negara Kesatuan RI dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi terbagi atas kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, termasuk pengelolaan keuangannya.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perbendaharaan Negara dalam Rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2022 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah serta Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah. Berdasarkan ketentuan pada peraturan-peraturan tersebut, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, asset, utang dan ekuitas dana yang berada dalam tanggung jawabnya serta menyiapkan Laporan Keuangan sehubungan dengan Pelaksanaan anggaran dan barang yang dikelolanya. Laporan Keuangan yang dimaksud terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1.1.1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan secara umum bertujuan untuk menyajikan informasi yang akurat dan transparan mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan pelaksanaan anggaran untuk memenuhi tanggung jawab konstitusi sesuai dengan ketentuan UU No. 17/2023, UU No. 1/2004, PP No. 12/2019, PP No. 71/2010, Perda No. 03/2022, Perbub No. 50/2022, Perbub No. 51/2022.

Maksud dari laporan keuangan ini adalah:

- a. *Menunjukkan Transparansi Keuangan:* Menyediakan gambaran yang jelas tentang pengelolaan keuangan dan sumber daya yang dikelola, sehingga dapat dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan.

- b. *Memperkuat Akuntabilitas*: Memberikan bukti bahwa semua transaksi keuangan telah diproses dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, serta menunjukkan tanggung jawab pengelola keuangan dalam menjalankan amanah yang diberikan.
- c. *Menggambarkan Kinerja Keuangan*: Menyajikan hasil pencapaian target anggaran, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran, untuk memberikan wawasan mengenai efektivitas penggunaan anggaran.

1.1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun tujuan dari penyusunan laporan keuangan ini meliputi beberapa aspek penting sebagai berikut:

- a. *Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas*: Laporan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, sehingga semua pemangku kepentingan dapat memahami dan mengevaluasi kinerja keuangan SKPD.
- b. *Memberikan Informasi yang Relevan dan Akurat*: Menyediakan data keuangan yang relevan, akurat, dan lengkap mengenai sumber daya ekonomi, posisi dan kondisi keuangan, perubahan dan potensi keuangan serta realisasi anggaran, aset, kewajiban, dan perubahan ekuitas untuk mendukung analisis dan evaluasi oleh pihak internal dan eksternal.
- c. *Mendukung Pengambilan Keputusan*: Menyajikan informasi yang diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data, baik untuk perencanaan anggaran di masa depan maupun untuk perbaikan dalam pengelolaan keuangan saat ini.
- d. *Mematuhi Peraturan dan Standar Akuntansi*: Memastikan bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta standar akuntansi pemerintah, untuk menjaga integritas dan keandalan laporan.
- e. *Menilai Efektivitas Pengelolaan Anggaran*: Menyediakan ikhtisar mengenai pencapaian target anggaran dan evaluasi atas perbedaan antara anggaran yang direncanakan dan realisasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian tersebut.
- f. *Mencerminkan Kinerja Keuangan*: Menggambarkan hasil dari pengelolaan keuangan selama periode laporan, serta menyajikan informasi yang diperlukan untuk memahami pencapaian dan hambatan yang ada dalam pelaksanaan anggaran.

Dengan adanya laporan keuangan ini, diharapkan dapat menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan /ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran sehingga memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai kondisi keuangan SKPD di Kabupaten Lombok Tengah dan mendukung upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran di masa yang akan datang.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pelaporan kegiatan SKPD Kabupaten Lombok Tengah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah daerah antara lain:

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara; (khususnya pasal 23 ayat 1: *Anggaran Pendapatan dan belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*);
2. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Indonesia Nomor 47;
3. Undang-undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
6. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah;

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran dan neraca. Termasuk pula dalam catatan atas laporan keuangan adalah penyajian informasi yang di haruskan dan dianjurkan oleh pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang di perlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Adapun sistematika isi catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II. KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

- 2.1. Kebijakan Keuangan
- 2.2. Indikator pencapaian target kinerja Keuangan

BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian target yang telah ditetapkan

BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 1.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan SKPD/BLUD
- 1.2. Asumsi dasar penyusunan laporan keuangan
- 1.3. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.4. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.5. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD/BLUD

BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2. Penjelasan Pos-Pos Neraca
- 5.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
- 5.4. Penjelasan Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

BAB VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII. PENUTUP

LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN

BAB II
KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR
PENCAPAIAN TARGET IKHTISAR dan KINERJA KEUANGAN

2.1 KEBIJAKAN KEUANGAN

Dalam penatausahaan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Lombok Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sedang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2024 disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 dan APBD Perubahan disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2024.

Terkait dengan Perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja pada Kantor Camat Janapria Kabupaten Lombok Tengah, dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kantor Camat Janapria Tahun 2024

No	Uraian	Anggaran Murni	Anggaran setelah Perubahan	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5=4-3	6=(5/3)*100
I	Pendapatan				
1				
2				
	Jumlah Pendapatan				
II	Belanja	2.787.957.370	3.018.630.153	230.672.783	8%
1	Belanja Pegawai	1.916.606.148	2.147.278.931	230.672.783	12%
2	Belanja Barang dan Jasa	764.815.067	764.815.067		
3	Belanja Modal	106.536.155	106.536.155		
	Jumlah Belanja	2.681.421.215	2.912.093.998		
	Deficit/Surplus				

Menyikapi Kondisi Keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dengan adanya perubahan APBD Tahun 2024 tersebut diatas, beberapa strategi yang ditempuh oleh Kantor Camat Janapria Kabupaten Lombok Tengah, dengan melakukan kebijakan antara lain:

- 1) Upaya penghematan Belanja, dengan melakukan kebijakan antara lain:
 - a. Kerjasama antar lintas sektor dalam mensukseskan pelaksanaan kegiatan kecamatan.
 - b. Penyusunan RKA Sesuai dengan kebutuhan yang akan digunakan.

Ketersediaan dana untuk membiayai kegiatan menjadi faktor pembatas dalam mewujudkan kinerja kegiatan yang dilaksanakan. Permasalahan utama yang dihadapi oleh Kantor Camat Janapria Kabupaten Lombok Tengah antara lain:

 - a. Masih kurangnya pelaporan tepat waktu oleh Desa ke Kecamatan.
 - b. Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musrembangdes masih kurang

2.2 INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Camat Janapria Kabupaten Lombok Tengah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, pengelolaan keuangan, dan mendukung berbagai kegiatan operasional lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Camat Janapria Kabupaten Lombok Tengah. Semua ini dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan. Pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip tertib, disiplin, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Indikator pencapaian target kinerja keuangan tercermin pada penyerapan anggaran Belanja Operasi dan Belanja Modal dalam konteks penganggaran berdasar Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 pada masing-masing program yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kantor Camat Janapria yaitu:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Tujuan Program ini untuk mendukung pelaksanaan tugas kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan beberapa kegiatan yaitu perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan anggaran setelah perubahan senilai Rp27.834.080,00 terealisasi senilai Rp 25.970.400,00 atau 93,30%. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah dengan anggaran setelah perubahan senilai Rp 2.156.788.931,00 terealisasi senilai Rp 2.101.503.850,00 atau 97,44%. Kegiatan administrasi umum perangkat daerah dengan anggaran setelah perubahan senilai Rp 168.187.722,00 terealisasi senilai Rp 155.936.917,00 atau 92,72%. Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan anggaran setelah perubahan senilai Rp 22.516.000,00 terealisasi senilai Rp 17.482.675,00 atau 77,65%. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan anggaran setelah perubahan senilai Rp 124.560.020,00 terealisasi senilai Rp 123.305.090,00 atau 98,99%. Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan anggaran setelah perubahan senilai Rp 34.241.435,00 terealisasi senilai Rp 34.061.000,00 atau 99,47%.

2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Tujuan Program ini untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dengan anggaran setelah perubahan senilai Rp 13.530.000,00 terealisasi senilai Rp 13.500.000,00 atau 99,78%. Kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat dengan anggaran setelah perubahan senilai Rp 39.160.546,00 terealisasi senilai Rp 38.822.896,00 atau 99,14%.

3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Tujuan Program ini untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, terutama dalam mengatasi kemiskinan dan keterbelakangan. Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan kegiatan koordinasi

kegiatan pemberdayaan desa dengan anggaran setelah perubahan senilai Rp 28.152.369,00 terealisasi senilai Rp 28.048.518,00 atau 99,63%

- 4) **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**
 Tujuan Program ini untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, menciptakan kondisi kondusif, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah dengan anggaran setelah perubahan senilai Rp 304.460.050,00 terealisasi senilai Rp 304.430.777,00 atau 99,99%
- 5) **Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**
 Tujuan Program ini untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemerintahan desa berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan untuk mencegah penyelewengan, kecurangan, dan korupsi. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan kegiatan fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dengan anggaran setelah perubahan senilai Rp 61.883.000,00 terealisasi senilai Rp 61.883.000,00 atau 100%
- 6) **Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**
 Tujuan Program ini untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, dan teratur. Program ini juga bertujuan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap peraturan daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dengan anggaran setelah perubahan senilai Rp 37.316.000,00 terealisasi senilai Rp 37.309.450,00 atau 99,98%.

Ditinjau Dari konteks PP 71 Tahun 2010 terkait penyajian laporan keuangan sesuai SAP, target dan realisasi keuangan Kantor Camat Janapria Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024 dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut:

Tabel 2.2. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kantor Camat Janapria Tahun 2024

No.	Uraian	Anggaran Semula	Anggaran Perubahan	Realisasi Anggaran	% dari Anggaran
1	2	3	4	5	6=(5/4)*100
I	Pendapatan				
1				
2				
3	Dst				
	Jumlah Pendapatan				
II	Belanja	2.787.957.370	3.018.630.153	2.942.255.350	97,47
1	Belanja Operasi	2.681.421.215	2.912.093.998	2.835.900.030	97,38
1.1	Belanja Pegawai	1.916.606.148	2.147.278.931	2.091.994.627	97,43
1.2	Belanja Barang	764.815.067	764.815.067	743.905.403	97,27
1.3	Belanja Hibah				

2	Belanja Modal	106.536.155	106.536.155	106.355.320	99,83
2.1	Belanja Modal Tanah				
2.2	Belanja Modal Peralatan Mesin	105.018.755	105.018.755	104.838.320	99,83
2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.517.400	1.517.400	1.517.000	99,97
	Jumlah Belanja	2.787.957.370	3.018.630.153	2.942.255.350	97,47

Realisasi Belanja lebih rendah anggarannya senilai Rp 76.374.803 atau 3%, disebabkan karena adanya belanja pegawai yang tidak terserap 100%.

Kemudian berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Camat Janapria Kabupaten Lombok Tengah atas pelaksanaan program/kegiatan yang tercantum dalam DPA/DPPA tahun anggaran 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.3. Realisasi Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kantor Camat Janapria Tahun 2024

No	Uraian Program dan Kegiatan	Uraian Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6=(5/4)*100
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	B Predikat	B Predikat	100%
1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Input : dana	27.834.080	25.970.400	93,30%
		Output : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 Dokumen	20 Dokumen	100%
		Outcome : Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Kantor Camat Janapria	20 Dokumen	20 Dokumen	100%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Input : dana	2.156.788.931	2.101.503.850	97,44%
		Output : Jumlah dokumen administrasi keuangan	31 Dokumen	31 Dokumen	100%
		Outcome : Dokumen administrasi keuangan PD	31 Dokumen	31 Dokumen	100%
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Input : dana	168.187.722	155.936.917	92,72%
		Output : Jumlah dokumen administrasi Umum	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
			1 Dokumen	1 Dokumen	100%

No	Uraian Program dan Kegiatan	Uraian Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
		Outcome : Laporan administrasi umum PD			
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Input : dana	22.516.000	17.482.675	77,65%
		Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%
		Outcome : Layanan pemerintahan daerah	12 Bulan	12 Bulan	100%
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Input : dana	124.560.020	123.305.090	98,99%
		Output : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100%
		Outcome : BMD Kondisi Baik	7 Jenis	7 Jenis	100%
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Input : dana	34.241.435	34.061.000	99,47%
		Output : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Jenis	3 Jenis	100%
		Outcome : BMD Tercatat	3 Jenis	3 Jenis	100%
II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pelayanan yang dilimpahkan	100%	100%	100%
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Input : dana	13.530.000	13.500.000	99,78%
		Output : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	100%
		Outcome : Laporan penyelesaian bersama kegiatan pemerintahan di kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	100%
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Input : dana	39.160.546	38.822.896	99,14%
		Output : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	1 Laporan	100%
		Outcome : Laporan Hasil penyelesaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan	1 Laporan	1 Laporan	100%
III	Program Pemberdayaan	Persentase usulan masyarakat yang disetujui	20	15	75%

No	Uraian Program dan Kegiatan	Uraian Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
	Masyarakat Desa Dan Kelurahan				
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Input : dana	28.152.369	28.048.518	99,63%
		Output : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20 Lembaga Kemasyarakatan	20 Lembaga Kemasyarakatan	100%
		Outcome : Laporan Hasil Musrembang	1 Laporan	1 Laporan	100%
IV	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan	100%	95%	95%
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Input : dana	304.460.050	304.430.777	99,99%
		Output : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	300 Orang	300 Orang	100%
		Outcome : Laporan hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	3 Laporan	3 Laporan	100%
V	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menyampaikan laporan kinerja tepat waktu	95%	95%	100%
1	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Input : dana	61.883.000	61.883.000	100%
		Output : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3 Laporan	3 Laporan	100%
		Outcome : Laporan hasil Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3 Laporan	3 Laporan	100%
VI	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase pengendalian gangguan ketertiban masyarakat	100%	100%	100%
1		Input : dana	37.316.000	37.309.450	99,98%

No	Uraian Program dan Kegiatan	Uraian Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Output : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	100%
		Outcome : Laporan hasil Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	1 Laporan	1 Laporan	100%

(sumber data: DPA/DPPA, Laporan Kegiatan, LRA)

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SECARA UMUM

Kantor Camat Janapria Kabupaten Lombok Tengah mempunyai kedudukan sebagai unsur pelayanan masyarakat yang secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati. Pencapaian Kinerja Keuangan tergambar pada pencapaian realisasi anggaran tahun 2024 dan perbandingan dengan realisasi tahun anggaran 2023.

Tabel 3.1. Pencapaian Realisasi Anggaran tahun 2024 dan perbandingan dengan realisasi tahun anggaran 2023.

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi (Rp)		% Tahun 202n	
			Tahun 2024	Tahun 2023	Anggaran	Tahun 2023
1	2	3	4	5	$6=(4/3)*100$	$7=(4-5)/4*100$
A	PENDAPATAN					
1						
2						
3						
Jumlah Pendapatan						
B	BELANJA	3.018.630.153	2.942.255.350	2.816.847.974	97%	4%
1	BELANJA OPERASI	2.912.093.998	2.835.900.030	2.753.934.174	97%	3%
2	Belanja Pegawai	2.147.278.931	2.091.994.627	2.058.634.309	97%	2%
3	Belanja Barang dan Jasa	764.815.067	743.905.403	695.299.865	97%	7%
4						
5	BELANJA MODAL	106.536.155	106.355.320	62.913.800	99%	41%
6	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	105.018.755	104.838.320	62.913.800	99%	40%
7	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.517.400	1.517.000	0	99%	100%
Jumlah Belanja		3.018.630.153	2.942.255.350	2.816.847.974	97%	4%

Pada bagian belanja, terdapat penghematan/efisiensi pengeluaran senilai Rp 76.374.803,00 yaitu dari anggaran setelah perubahan senilai Rp3.018.630.153,00 terealisasi Rp2.942.255.350,00 atau 97,47%

Capaian bagian belanja senilai 97,47% terinci untuk masing-masing komponen belanja sebagai berikut:

- a. Belanja Pegawai, Target anggaran setelah perubahan senilai Rp2.147.278.931,00 terealisasi senilai Rp 2.091.994.627,00 atau 97,43%

- b. Belanja Barang dan Jasa, Target anggaran setelah perubahan senilai Rp 764.815.067,00 terealisasi senilai Rp 743.905.403,00 atau 97,27%
- c. Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Target anggaran setelah perubahan senilai Rp 105.018.755,00 terealisasi senilai Rp 104.838.320,00 atau 99,83%
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi, Target anggaran setelah perubahan senilai Rp 1.517.400,00 terealisasi senilai Rp 1.517.000,00 atau 99,97%

Dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, realisasi belanja terjadi kenaikan realisasi senilai 4%, yaitu Rp 2.816.847.974,00 Pada tahun 2023 menjadi Rp 2.942.255.350,00 Pada tahun 2024.

3.2. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Dalam Pelaksanaan kegiatan Kantor Camat Janapria Kabupaten Lombok Tengah terdapat hambatan dan Kendala dalam pelaksanaan pencapaian tersebut, yaitu:

- a. Kendala terkait dengan efisiensi belanja Barang dan Jasa

Hal tersebut disebabkan antara lain.

- a. Perencanaan anggaran yang kurang tepat pada belanja Listrik dan perjalanan dinas
- b. Pembuatan anggaran yang tidak cakup

Solusi yang dilakukan dalam mengatasi kendala dan hambatan, antara lain:

- a. Pelatihan atau bimtek staf perencanaan
- b. Memperkuat koordinasi dan konsultasi pada saat penyusunan anggaran

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi disusun untuk mengatur atau sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan daerah. Laporan keuangan daerah adalah laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan serta menunjukkan posisi keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintahan. Sehubungan dengan berlakunya PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), maka kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan sejak tahun 2016 juga telah mengalami perubahan.

4.1 ASUMSI DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Beberapa hal yang dipertimbangkan dalam penyusunan laporan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut:

a. Asumsi Kemandirian Entitas;

Bahwa Unit Pemerintah Daerah sebagai entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk Menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan asset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan asset dan sumberdaya dimaksud, utang piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksana atau tidaknya program yang telah ditetapkan.

b. Asumsi Kesenambungan Entitas;

Berarti bahwa laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas tersebut akan berlanjut keberadaannya dan tidak dimaksudkan untuk melakukan likuidasi.

c. Asumsi Keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement);

Berarti bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi. Satuan uang yang digunakan adalah rupiah.

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Basis Akuntansi dalam penyusunan Laporan Keuangan yang diberlakukan untuk setiap SKPD Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut:

a. Basis Kas (cash basis) untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran

Basis kas digunakan untuk pengakuan pendapatan-LRA, belanja transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja serta transfer diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran.

b. Basis Akrua (Accrual basis) untuk penyusunan Laporan Finansial

Basis Akrua untuk pengakuan pendapatan-LO, beban dan pos-pos luar biasa dalam Laporan Operasional, asset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca. Basis Akrua untuk Laporan Operasional, bahwa pendapatan-LO diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Sedangkan basis Akrua untuk Neraca, berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada Keuangan Daerah, tanpa memperhatikan saat Kas atau Setara Kas diterima atau dibayar.

4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam Laporan Keuangan. Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan menggunakan **nilai perolehan historis dan dalam mata uang rupiah**. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dengan kurs Bank Indonesia pada tanggal transaksi dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.3.1 Kas dan Setara Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas dan setara kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola Bendahara Pengeluaran. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan. Sedangkan setara kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang liquid, yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan.

4.3.2 Piutang/Tagihan ke Pihak Ketiga

Piutang merupakan hak atau klaim entitas pemerintah kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi. Piutang daerah diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan kerugian piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang dan dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang. Umur piutang dihitung sejak timbulnya piutang sampai dengan akhir periode pelaporan.

4.3.3 Persediaan

Berdasarkan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah bahwa perlakuan persediaan sebagai berikut:

- a. Persediaan dinilai dengan perhitungan fisik diakhir periode
- b. Persediaan yang berasal dari pembelian dinilai berdasarkan biaya perolehan
- c. Persediaan yang berasal dari produksi sendiri dinilai berdasarkan biaya standar
- d. Persediaan yang berasal dari hibah dinilai berdasarkan nilai wajar
- e. Saldo persediaan dihitung berdasarkan harga pembelian akhir
- f. Pencatatan persediaan menggunakan metode periodik dan perpetual.
- g. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLK.

4.3.4 Pengukuran Aset Tetap secara Umum

- a. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan merupakan jumlah kas atau setara kas yang telah dan masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu asset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan asset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- b. Aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan belanja modal ditambah semua biaya yang dikeluarkan sampai dengan asset tersebut siap untuk digunakan dalam periode berjalan.
- c. Asset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berjalan, yaitu pada saat asset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.
- d. Dalam pengakuan asset tetap harus dibuat ketentuan yang membedakan antara penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.
- e. Berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.
- f. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian
- g. Aset tetap dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan. Jika penilaian asset tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai asset tetap berdasarkan tetap pada harga perolehan yang diestimasi atau menggunakan NJOP setempat.

- h. Pelepasan Aset tetap dapat dilakukan melalui penjualan atau pertukaran. Hasil penjualan aset tetap akan diakui seluruhnya sebagai pendapatan. Aset tetap yang diperoleh karena pertukaran dinilai sebesar nilai wajar aset tetap yang diserahkan, mana yang lebih mudah.
- i. Penghapusan aset tetap dilakukan jika aset tetap tersebut rusak berat, usang, hilang dan sebagainya. Penghapusan aset tetap ditetapkan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.
- j. Perubahan nilai aset tetap dapat disebabkan oleh penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.

4.3.5 Tanah

Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian untuk biaya pembebasan tanah, biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan biaya penimbunan. Nilai tanah termasuk juga harga pembelian bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sesuatu yang baru jika bangunan itu dimaksudkan untuk dibongkar.

4.3.6 Peralatan dan Mesin

- a. Peralatan dan mesin diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh alat-alat dan mesin sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan asset tersebut sehingga dapat digunakan.
- b. Kendaraan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan asset tersebut sehingga dapat digunakan.
- c. Meubelair dan perlengkapan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan asset tersebut sehingga dapat digunakan.

4.3.7 Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli atau biaya konstruksi, biaya pembebasan tanah, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.

4.3.8 Jalan, Jaringan dan Instalasi

- a. Jalan dan jembatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun jalan dan jembatan sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah untuk pembangunan jalan) sampai dengan jalan dan jembatan siap untuk digunakan.
- b. Instalasi diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun instalasi sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan instalasi tersebut siap untuk digunakan.
- c. Bangunan air irigasi diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun irigasi sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan irigasi tersebut siap untuk digunakan.

4.3.9 Aset Tetap lainnya

Aset Tetap Lainnya mencakup Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

4.3.10 Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset yang berasal dari reklas aset yang mengalami rusak berat dan tidak dapat digunakan kembali. Data aset lainnya ini hasil identifikasi aset dalam kegiatan akselerasi aset yang dilakukan antara pengurus barang Kabupaten Lombok Tengah dengan Bagian Aset Setda Kabupaten Lombok Tengah, karena aset lainnya ini mengalami rusak berat dan benar-benar tidak dapat digunakan, maka aset ini direncanakan akan diajukan penghapusan.

4.3.11 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek dinilai dengan nominal mata uang rupiah yang harus dibayar.

4.3.12 Kewajiban Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk utang adalah sebesar jumlah yang belum dibayar yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA SKPD

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Kabupaten Lombok Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan telah dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan setiap rekening laporan keuangan

menerapkan sepenuhnya Standar Akuntansi Pemerintahan dengan pengecualian untuk penerapan penyusutan aset tetap. Dalam rangka penerapan SAP tersebut, maka beberapa penyesuaian telah dilakukan antara lain dengan pengklasifikasian dan pengelompokan penyajian pos-pos pada Neraca dan LRA. Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

A. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas Pemerintah Daerah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.

Beberapa hal yang terkait dengan kebijakan akuntansi pendapatan antara lain:

- a. Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak daerah;
- b. Pendapatan diakui atas dasar kas, yaitu pada saat diterima pada kas daerah;
- c. Pencatatan pendapatan berdasarkan azas bruto yaitu mencatat penerimaan bruto dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- d. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal yang diterima. Apabila pendapatan diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs Tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan;
- e. Pengembalian/koreksi atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode akuntansi dicatat sebagai pengurang pendapatan. Apabila pengembalian/koreksi pendapatan terjadi setelah periode akuntansi berikutnya dicatat sebagai pengurang ekuitas dana lancar (SiLPA);
- f. Pendapatan diklasifikasikan menurut kelompoknya antara lain: Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;

2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah yang menjadi beban Daerah. Belanja diakui atas dasar kas, yaitu pada saat terjadinya pengeluaran dari kas Daerah;

Beberapa hal yang terkait dengan kebijakan akuntansi Belanja antara lain:

- a. Koreksi atas pengeluaran belanja yang terjadi pada periode akuntansi dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode akuntansi berikutnya dicatat sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
 - b. Belanja diklasifikasikan sesuai SAP yaitu: belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja bagi hasil-transfer.
 - c. Belanja Operasi diklasifikasikan atas: belanja pegawai, belanja barang, belanja jasa, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.
 - d. Belanja modal diklasifikasikan atas: belanja tanah, belanja peralatan & mesin, belanja gedung & bangunan, belanja jalan, irigasi & jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya.
3. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
4. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan, penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah.

B. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

I. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional Pemerintah Daerah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Daerah.

I.1. Aset Lancar

Aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi. Aset lancar antara lain: Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR), Piutang Lainnya, dan Persediaan.

I.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang persediaan (UP) yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca dan mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Pengeluaran dicatat senilai nilai nominal artinya disajikan senilai nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

I.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan dari bendahara penerimaan yang bersangkutan. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan dari setoran para wajib pajak/retribusi yang belum disetorkan ke kas daerah. Kas di Bendahara Penerimaan dicatat senilai nilai nominal artinya disajikan senilai nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

I.1.3 Piutang Pajak

Piutang pajak adalah merupakan piutang atas pajak-pajak daerah yang dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak yang pembayarannya belum diterima. Piutang pajak dicatat senilai nilai nominal yaitu senilai nilai rupiah pajak-pajak yang belum dilunasi.

I.1.4 Piutang Retribusi

Piutang Retribusi merupakan piutang yang diakui atas jumlah yang belum terbayar senilai nilai rupiah dari retribusi yang belum dilunasi berdasarkan bukti penetapan retribusi. Perkiraan piutang retribusi dicatat senilai nilai nominal yaitu senilai nilai rupiah dari retribusi yang belum dilunasi.

I.1.5 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang ke dalam piutang jangka pendek yang disebabkan karena adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berjalan. Bagian

Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dicatat senilai nilai nominal yaitu sejumlah tagihan penjualan angsuran yang harus diterima dalam waktu satu tahun.

I.1.6 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa TGR ke dalam aset lancar disebabkan adanya TGR jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dicatat senilai nilai nominal yaitu sejumlah rupiah Tuntutan Ganti Rugi yang akan diterima dalam waktu satu tahun. Dokumen sumber TGR adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan Majelis Pembebanan TP/TGR. Dalam hal Surat Keputusan tersebut terlambat atau tidak diterbitkan, dokumen sumber untuk Piutang TGR diperoleh dari hasil pemeriksaan APIP.

I.1.7 Piutang Lainnya

Akun Piutang Lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang di luar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dan Piutang Pajak. Piutang Lainnya dicatat senilai nilai nominal yaitu senilai nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

I.1.8 Persediaan

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan. Saldo persediaan adalah jumlah persediaan yang masih ada pada tanggal neraca. Persediaan dicatat senilai biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

I.2. Investasi Permanen

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Bentuk investasi permanen antara lain Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan Investasi Permanen Lainnya.

I.2.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah menggambarkan jumlah yang dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk penyertaan modal dalam perusahaan negara/daerah dan perolehan deviden dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang dikapitalisir kembali. Penyertaan modal pemerintah dicatat senilai harga perolehan jika kepemilikan kurang dari 20% dan tidak memiliki kendali yang signifikan. Kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki kendali yang signifikan dan kepemilikan 51% atau lebih dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan/lembaga yang dimaksud.

Untuk pencatatan dengan metode ekuitas, nilai penyertaan modal pemerintah daerah dihitung dari nilai ekuitas yang ada di laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan dikalikan dengan persentase kepemilikan.

1.2.2 Investasi Permanen Lainnya-Dana Bergulir

Investasi Permanen Lainnya adalah investasi permanen yang tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. Investasi Dana Bergulir merupakan dana yang dipinjamkan kepada kelompok masyarakat untuk ditarik kembali setelah jangka waktu tertentu dan kemudian disalurkan kembali. Investasi permanen lainnya dicatat senilai harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperolehnya. Investasi Dana Bergulir dinilai senilai jumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).

I.3 Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Perkiraan aset tetap terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Akumulasi Penyusutan.

Biaya pemeliharaan untuk mempertahankan kondisi aset agar tetap dapat digunakan tidak dikapitalisir ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan, sedangkan biaya rehabilitasi yang menambah umur dan manfaat dikapitalisir ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan.

I.3.1 Tanah

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Tanah diakui sebagai aset pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Harga perolehan ini meliputi harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Jika tidak tersedia data secara memadai, maka tanah dicatat dengan estimasi harga perolehan.

I.3.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup antara lain: alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi, pengolahan dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan.

Peralatan dan mesin dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi

perpindahan hak kepemilikan. Peralatan dan mesin dicatat dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Harga perolehan peralatan dan mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai peralatan dan mesin dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi oleh instansi teknis terkait. Peralatan dan mesin yang berasal dari hibah dinilai berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.

I.3.3 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan Bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung; monumen; bangunan menara; dan rambu-rambu. Gedung dan bangunan dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi peralihan hak kepemilikan. Gedung dan bangunan dicatat dengan nilai historis, harga perolehan. Harga perolehan gedung dan bangunan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai gedung dan bangunan dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi.

I.3.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Jalan, irigasi dan jaringan di neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan; bangunan air; instalasi; dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Jalan, irigasi dan jaringan dicatat sebagai aset pemerintah saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis/perolehan, yaitu harga perolehan. Harga perolehan jalan, irigasi, jaringan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (Tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai jalan, irigasi dan jaringan dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi.

I.3.5 Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku, barang bercorak seni/budaya/olah raga dan

hewan/tanaman. Aset tetap lainnya dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Aset tetap lainnya dicatat dengan nilai historis/harga perolehan. Harga perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (Tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai aset tetap lainnya dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi.

I.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasi sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun.

I.3.7 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan menggambarkan akumulasi jumlah penurunan nilai ekonomis aset tetap pada tanggal laporan keuangan. Dengan demikian penyusutan tidak dimaksudkan untuk mengukur besarnya biaya yang dikorbankan untuk memperoleh pendapatan ataupun keuntungan.

I.4 Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana Cadangan. Aset lainnya antara lain terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran dan Aset Lain-lain.

1.4.1 Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas. Tagihan penjualan angsuran dinilai senilai nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

1.4.2 Aset Lain-lain

Aset Lain-lain adalah aset-aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Ganti Rugi dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah (aset tetap yang kondisinya rusak berat). Aset Lain-lain dicatat dengan nilai nominal dari aset yang bersangkutan. Untuk aset tetap yang diklasifikasikan ke dalam Aset Lain-lain, dicantumkan senilai nilai perolehannya. Terhadap Aset lain-lain tidak dilakukan penyusutan.

II. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.

II.1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban ini mencakup Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Dalam Negeri-Pemerintah Pusat, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

II.1.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK merupakan utang yang timbul akibat pemerintah belum menyetor kepada pihak lain atas pungutan/potongan PFK dari Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) atau dokumen lain yang dipersamakan. Pungutan/potongan PFK dapat berupa potongan/pungutan Iuran Taspen, Bapertarum, Askes, juga termasuk pajak-pajak pusat. Perkiraan ini dicatat sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong berdasarkan nilai nominal.

II.1.2. Pendapatan Yang Ditangguhkan

Pendapatan yang Ditangguhkan yaitu adanya pendapatan yang telah diterima oleh SKPD tetapi belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca, misalnya jasa giro atas rekening bank setiap bendaharawan uang di SKPD, pendapatan yang diterima oleh Bendaharawan Penerimaan belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca.

II.2 Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban jangka panjang digunakan untuk membiayai pembangunan prasarana yang merupakan aset daerah yang dapat menghasilkan penerimaan (baik langsung maupun tidak langsung) untuk pembayaran kembali pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat.

III. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Pos Ekuitas Dana terdiri dari tiga kelompok, yaitu Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan.

III.1. Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Kelompok Ekuitas Dana Lancar antara lain terdiri dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran/SILPA, Pendapatan yang Ditangguhkan, Cadangan Piutang, Cadangan Persediaan dan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

III.2. Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Pos ini terdiri dari:

- a) Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang, yang merupakan akun lawan dari Investasi Jangka Panjang.
- b) Diinvestasikan dalam Aset Tetap, yang merupakan akun lawan dari Aset Tetap.
- c) Diinvestasikan dalam Aset Lainnya, yang merupakan akun lawan Aset Lainnya.
- d) Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang, yang merupakan akun lawan dari seluruh Utang Jangka Panjang.

C. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
2. Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
3. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
4. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

D. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Camat Janapria terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan dengan penjelasan sebagai berikut.

5.1. PENJELASAN ATAS POS - POS LRA

LRA merupakan Laporan yang mengungkapkan kegiatan keuangan Kantor Camat Janapria yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan ini menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam satu periode pelaporan. Secara lebih rinci LRA Kantor Camat Janapria pada TA 2024 diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.1.1. BELANJA

Realisasi belanja daerah yang tertuang dalam perubahan APBD TA 2024 adalah sebesar Rp 2.942.255.350,00 mencapai 97,47% dari anggaran belanja daerah TA 2024 sebesar Rp 3.018.630.153,00. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.10. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Operasi	2.912.093.998,00	2.835.900.030,00	97,38	2.753.934.174,00
2.	Belanja Modal	106.536.155,00	106.355.320,00	99,83	62.913.800,00
3.	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Belanja Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		3.018.630.153,00	2.942.255.350,00	97,47	2.816.847.974,00

5.1.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi TA 2024 terealisasi sebesar Rp2.835.900.030,00 atau mencapai 97,38% dari anggaran Belanja Operasi TA 2024 sebesar Rp2.912.093.998,00. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.11. Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Pegawai	2.147.278.931,00	2.091.994.627,00	97,43	2.058.634.309,00
2	Belanja Barang Jasa	764.815.067,00	743.905.403,00	97,27	695.299.865,00

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
J u m l a h		2.912.093.998,00	2.835.900.030,00	97,38	2.753.934.174,00

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai TA 2024 terealisasi sebesar Rp2.091.994.627,00 atau mencapai 97,43% dari anggaran Belanja Pegawai TA 2024 sebesar Rp2.147.278.931,00. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.12. Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Belanja Pegawai	2.147.278.931	2.091.994.627	97,43	2.058.634.309
a.	Gaji dan Tunjangan	1.470.242.431,00	1.423.622.262,00	96,83	1.460.161.390,00
1	Belanja Gaji Pokok ASN	1.155.274.526,00	1.120.462.745,00	96,99	1.137.083.880,00
	Belanja Gaji Pokok PNS	1.155.274.526,00	1.120.462.745,00	96,99	1.137.083.880,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	134.337.331,00	128.184.371,00	95,42	136.491.923,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	134.337.331	128.184.371	95,42	136.491.923
3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	78.370.000	78.370.000	100,00	75.480.000
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	31.785.000	29.788.000	93,72	34.370.000
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Tunjangan Beras ASN	67.785.120	64.308.960	94,87	73.071.780
	Belanja Tunjangan Beras PNS				
6	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.676.345	2.494.993	93,22	3.645.672
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS				
7	Belanja Pembulatan Gaji ASN	14.109	13.193	93,51	18.135
	Belanja Pembulatan Gaji PNS				
b.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	674.222.500	665.558.365	98,71	595.658.919
1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	674.222.500	665.558.365	98,71	595.658.919
c.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.814.000	2.814.000	100,00	2.814.000
1	Belanja Honorarium	2.814.000	2.814.000	100,00	2.814.000
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.814.000	2.814.000	100,00	2.814.000

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Jumlah	2.147.278.931	2.091.994.627	97,43	2.058.634.309

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Pegawai di TA 2024 dan realisasi Tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

1. Kenaikan gaji pokok PNS di tahun 2024 adalah sebesar 8%.
2. Kenaikan gaji pokok karena kenaikan berkala pegawai Kantor Camat Janapria sebanyak 3 pegawai.

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa TA 2024 terealisasi sebesar Rp743.905.403 atau mencapai 97,27% dari anggaran Belanja Barang dan Jasa TA 2024 sebesar Rp764.815.067. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.13. Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Belanja Barang Jasa	764.815.067	743.905.403	97,27	695.299.865
1	Belanja Barang	385.010.788	384.710.523	99,92	439.907.668
	a. Belanja Bahan Pakai Habis	385.010.788	384.710.523	99,92	439.907.668
	b. Belanja Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Jasa	167.666.279	161.694.263	96,44	128.234.417
	a. Belanja Jasa Kantor	110.256.020	104.583.456	94,86	49.287.542
	b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	720.000	432.000	60,00	432.000
	c. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	52.190.259	52.178.807	99,98	44.189.875
	d. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.500.000	4.500.000	100,00	34.325.000
3	Belanja Pemeliharaan	78.120.000	77.507.809	99,22	28.722.000
	a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.420.000	6.420.000	100,00	6.420.000
	b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	71.700.000	71.087.809	99,15	22.302.000
4	Belanja Perjalanan Dinas	90.518.000	76.492.808	84,51	12.735.780
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	90.518.000	76.492.808	84,51	12.735.780
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	43.500.000	43.500.000	100,00	85.700.000
	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak	43.500.000	43.500.000	100,00	85.700.000

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Lain/Masyarakat				
	Jumlah	2.912.093.998	2.835.900.030	97,38	2.753.934.174

Sebab-sebab tinggi capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Barang dan Jasa di TA 2024 dan realisasi Tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan lebih banyak dilakukan di tahun 2024 sehingga penganggaran dukungannya lebih banyak.
2. Penambahan tenaga honorarium di Kantor Camat Janapria.

5.1.2.2. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal digunakan untuk membiayai pengadaan aset. Realisasi Belanja Modal TA 2024 sebesar Rp106.355.320 atau mencapai 99,83% dari anggaran Belanja Modal TA 2024 sebesar Rp106.536.155. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.14. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

No.	Uraian	2024			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	105.018.755	104.838.320	99,83	62.913.800
3	Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.517.400	1.517.000	99,97	0
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	106.536.155	106.355.320	99,83	62.913.800

Belanja Modal dengan rincian sebagai berikut.

5.1.2.2.1. Belanja Modal Tanah

Pada Tahun 2024 tidak terdapat anggaran dan realisasi belanja modal Tanah.

5.1.2.2.2. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun Anggaran 2024 di realisasikan sebesar Rp104.838.320,00 atau mencapai 99,83% dari anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp105.018.755,00. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.15. Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Belanja Peralatan dan Mesin				
1	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	34.241.435	34.061.000	99,47	14.162.000
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	34.241.435	34.061.000	99,47	14.162.000
	Belanja Modal Mebel	34.241.435	34.061.000	99,47	0
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0	0	0,00	14.162.000
2	Belanja Modal Komputer	70.777.320	70.777.320	100,00	48.751.800
	Belanja Modal Komputer Unit	70.777.320	70.777.320	100,00	48.751.800
	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	59.880.000	59.880.000	100,00	45.717.000
	Belanja Modal Peralatan Komputer	59.880.000	59.880.000	100,00	45.717.000
	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	59.880.000	59.880.000	100,00	45.717.000
	J u m l a h	105.018.755	104.838.320	99,83	62.913.800

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin dibandingkan dengan anggaran TA 2024 dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan sebagai berikut:

1. Tahun 2024 lebih banyak membeli Komputer untuk kebutuhan masing-masing kasi.
2. Pembelian mebel 2024 lebih banyak.

5.1.2.2.3. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2024 terealisasi sebesar Rp1.517.000,00 atau mencapai 99,97,00% dari anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2024 sebesar Rp1.517.400,00. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.17. Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan				
1	Belanja Modal Instalasi	1.517.400	1.517.000	99,97	0
	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	1.517.400	1.517.000	99,97	0
	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	1.517.400	1.517.000	99,97	0
	J u m l a h	1.517.400	1.517.000	99,97	0

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dibandingkan dengan anggaran TA 2024 dan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan

Jaringan Tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan sebagai berikut:

1. Terjadi kenaikan karena tahun 2023 tidak dianggarkan instalasi Listrik.

5.1.2. SURPLUS/(DEFISIT)-LRA

Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp2.942.255.350,00, sehingga terjadi Surplus realisasi APBD sebesar Rp2.942.255.350,00 atau (97,47)% dari anggaran sebesar (Rp3.018.630.153,00) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.21. Rekapitulasi Perhitungan Surplus/(Defisit) LRA

No.	Uraian	2024		%	2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja	3.018.630.153,00	2.942.255.350,00	97,47	2.816.847.974,00
Surplus/ (Defisit)		(3.018.630.153,00)	(2.942.255.350,00)	97,47	(2.816.847.974,00)

5.3. PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan Kantor Camat Janapria mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas Per 31 Desember 2024 dan 2023 dengan penjelasan sebagai berikut:

5.3.1. ASET

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Saldo Aset Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp 9.249.026.346 dan Rp 9.244.897.348 Berikut daftar rincian saldo Aset:

Tabel 5.29. Rincian Aset

No	Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)
1	Aset Lancar	353.000	420.036
2	Investasi Jangka Panjang	9,234,126,786	9,229,930,352
3	Aset Tetap		
4	Properti Investasi		
5	Aset Lainnya	14,546,560	14,546,560
	Jumlah	9.249.026.346	9.244.897.348

Berikut rincian per item aset.

5.3.1.1. Aset Lancar

Aset Lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, Piutang, beban dibayar dimuka dan persediaan.

Saldo Aset Lancar Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp353.000 dan Rp 420.036 Berikut daftar rincian Aset Lancar:

Tabel 5.30. Rincian Aset Lancar

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Kas dan setara Kas		
2	Piutang		
3	Penyisihan Piutang		
4	Beban dibayar dimuka		
5	Persediaan	353.000	420.036
	Jumlah	353.000	420.036

Berikut ini adalah rincian aset lancar.

5.3.1.1.1 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Persediaan Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp353.000 dan Rp 420.036 Persediaan tersebut merupakan persediaan barang pakai habis yang masih tersisa di SKPD berdasarkan pemeriksaan fisik (*stock opname*) dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Berikut rinciannya.

Tabel 5.50 Persediaan

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Alat Tulis Kantor	55.000	420.036
2	Bahan Komputer	298.000	0
	Jumlah	353.000	420.036

Rincian Persediaan Per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada Lampiran

5.3.1.2 Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Saldo Aset Tetap setelah penyusutan Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp... dan Rp... Saldo Aset Tetap terdiri dari:

Tabel 5.52. Daftar Nilai Aset Tetap

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Tanah	8,266,952,000.00	8,266,952,000.00
2	Peralatan dan Mesin	1,038,947,770.00	934,109,450.00
3	Gedung dan Bangunan	1,257,173,000.00	1,257,173,000.00
4	Jalan, Irigasi dan Jembatan	15,704,500.00	14,187,500.00
5	Aset Tetap Lainnya	-	-
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
	Jumlah Aset Tetap sebelum penyusutan	10,578,777,270.00	10,472,421,950.00
7	Akumulasi Penyusutan	(1,344,650,484.00)	(1,242,491,598.00)
	Jumlah Bersih	9,234,126,786.00	9,229,930,352.00

Rincian Aset Tetap berdasarkan objek Aset Tetap Per 31 Desember 2024 sebagai berikut;

5.3.1.2.1 Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.

Saldo Aset Tetap Tanah Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp 8,266,952,000.00 dan Rp 8,266,952,000.00 Rincian aset tetap tanah per 31 Desember 2024 sebagai mana dalam tabel dibawah ini:

Tabel 5.53. Daftar Nilai Aset Tetap Tanah

Kode	Uraian Aset Tetap Tanah	Nilai Per 31 Desember 2024	Nilai Per 31 Desember 2023
1.3.1	Tanah		
1.3.1.01	Tanah	8,266,952,000.00	8,266,952,000.00
1.3.1.01.01	Tanah Persil	8,266,952,000.00	8,266,952,000.00
1.3.1.01.01.01	Tanah Bangunan Perumahan/G.Tempat Tinggal dst	8,266,952,000.00	8,266,952,000.00

5.3.1.2.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup antara lain alat berat, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, alat persenjataan, komputer, alat eksplorasi, alat pemboran, alat produksi, pengolahan dan pemurnian, alat bantu eksplorasi, alat keselamatan kerja, alat peraga, dan unit peralatan produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebelum penyusutan Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp1,038,947,770.00 dan Rp 934,109,450.00 Rincian aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 sebagaimana dalam tabel dibawah ini :

Tabel 5.55 Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Kode Rekening	Uraian Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Nilai Per 31 Desember 2024	Nilai Per 31 Desember 2023
1.3.2	Peralatan Dan Mesin	1,038,947,770.00	934,109,450.00
1.3.2.01	Alat Besar	500,000	500,000
1.3.2.02	Alat Angkutan	358,435,950	358,435,950
1.3.2.04	Alat Pertanian	500,000	500,000
1.3.2.05	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	328,258,350	328,258,350
1.3.2.06	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	18,500,000	18,500,000
1.3.2.08	Alat Laboratorium	5,340,000	5,340,000
1.3.2.10	Komputer	375,167,440.00	270,329,120
1.3.2.15	Alat Keselamatan Kerja	33,394,350	33,394,350

Peningkatan Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp 104,838,320.00 disajikan sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 5.56. Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2024

No	Uraian	Nilai (RP)
I	Saldo Awal	934,109,450.00
II	Penambahan	
1	Belanja Modal TA 2024	104,838,320.00
2	Mutasi antar OPD	
3	Reklasifikasi Antar KIB	
4	Aset yang yang di Peroleh dari Belanja Barang dan Jasa	
5	Reklasifikasi dari Aset Lainnya/RR/RB	
6	Aset Tetap Yang di Peroleh dai Hibah	
7	Koreksi akibat Nomerasi Sistem SIMDA BMD	
	Jumlah Mutasi Tambah	
III	Pengurangan	
1	Aset yang dikeluarkan (Barang Habis Pakai berupa alat kebersihan) dan Barang diserahkan ke Masyarakat	
2	Ekstracomtabel	
3	Dihibahkan ke masyarakat /Pihak Ke III dan Instansi Lain	
4	Reklas ke KIB Lainnya	
5	Mutasi antar OPD	
6	Koreksi akibat Nomerasi Sistem SIMDA BMD	
	Jumlah Mutasi Kurang	
IV	Saldo Akhir	1,038,947,770.00

5.3.1.2.3 Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Gedung dan bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung, monumen, bangunan menara, dan rambu-rambu. Termasuk dalam bangunan dan gedung adalah teralis yang digunakan untuk sarana pendukung gedung tersebut.

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp...dan Rp... Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2024 sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel : 5.57. Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Kode Rekening	Uraian Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Nilai Per 31 Desember 2024	Nilai Per 31 Desember 2023
1.3.3	Gedung Dan Bangunan	1,257,173,000.00	1,257,173,000.00
1.3.3.01	Bangunan Gedung	1,174,694,000	1,174,694,000
1.3.3.02	Monumen		
1.3.3.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	82,479,000	82,479,000

5.3.1.3.4 . Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebelum penyusutan Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp15,704,500 dan Rp14,187,500 Rincian nilai aset tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Per 31 Desember 2024 sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 5.59 Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi

Kode Rekening	Uraian Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi	Nilai Per 31 Desember 2024	Nilai Per 31 Desember 2023
1.3.4	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	15,704,500.00	14,187,500.00
1.3.4.01	Jalan Dan Jembatan		
1.3.4.02	Bangunan Air		
1.3.4.04	Jaringan	15,704,500.00	14,187,500

Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024 sebagaimana rincian dalam tabel berikut.

Tabel 5.60 Penambahan dan Pengurangan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024

No	Uraian	Nilai (RP)
I	Saldo Awal	14,187,500
II	Penambahan	
1	Belanja Modal TA 2024	1,517,000.00
2	Penyesuaian/ Reklas antar KIB	
3	Hutang Kepada Pihak Ke Tiga	
4	Penerimaan Hibah	
5	Mutasi antar OPD	
6	Nilai Taksiran	
	Jumlah Mutasi Tambah	
III	Pengurangan	
1	Mutasi antar OPD	
2	Reklas ke KDP	
3	Kurang Volume Pekerjaan	
	Jumlah Mutasi Kurang	
IV	Saldo Akhir	15,704,500.00

5.3.1.3.5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai penyusutan Aset Tetap. Saldo Penyusutan aset tetap Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp(1,344,650,484.00) dan Rp (1,242,491,598.00)

5.3.1.3 Aset Lainnya

Saldo bersih Aset Lainnya Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp 14,546,560.00 dan Rp 14,546,560.00 Saldo bersih Aset Lainnya Per 31 Desember 2023 Rincian Aset Lainnya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.64. Daftar Aset Lainnya

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Tagihan Jangka Panjang/Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		
2	Kemitraan dengan Pihak III		
	Akumulasi Penyusutan		
	Kemitraan dg Pihak III Netto		
3	Aset Tak Berwujud		
4	Aset Lain-lain :	14,546,560.00	14,546,560.00
	Aset Dalam Proses TGR		
	Aset Rusak Berat		
	DED		
	Barang Diserahkan Ke Masyarakat		
	Aset dalam proses penghapusan		
	Dana Transfer-Dana Bagi Hasil TDF		
	Piutang Retribusi dalam Proses Penghapusan		
	Jumlah	14,546,560.00	14,546,560.00

5.3.2 KEWAJIBAN

Kewajiban adalah Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban di klasifikasi menjadi Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Nilai Kewajiban Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp 48,197,110.00 dan Rp 48,603,044.00 Rincian kewajiban sebagai berikut.

Tabel 5.65. Rincian Kewajiban

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Kewajiban Jangka Pendek	48,197,110.00	48,603,044.00
2	Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	Jumlah	48,197,110.00	48,603,044.00

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Posisi kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp 48,197,110.00 dan Rp 48,603,044.00. Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari:

Tabel 5.66. Rincian Kewajiban Jangka Pendek

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
2	Utang Bunga		
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		
4	Pendapatan Diterima Dimuka		
5	Utang Belanja	48,197,110.00	48,603,044.00
6	Utang Jangka Pendek Lainnya		
7	Utang Transfer		
	Jumlah	48,197,110.00	48,603,044.00

5.3.2.1.1 Utang Belanja dan Transfer

Saldo Utang Belanja Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp 48,197,110.00 dan Rp 48,603,044.00 Utang Belanja dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.69. Rincian Utang Belanja

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31-Des-2023 (Rp)
1	Utang Belanja Pegawai	47,307,110.00	48,134,344.00
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	890,000.00	468,700.00
3	Utang Belanja Perjalanan Dinas		
3	Utang Belanja Modal		
4	Utang Belanja Bansos		
5	Utang Belanja Transfer		
	Total	48,197,110.00	48,603,044.00

5.3.2.1.5.1. Utang Belanja Pegawai

Utang Belanja Pegawai Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp47,307,110.00 dan Rp48,134,344.00 Berikut rincian utang belanja pegawai.

Tabel 5.70. Rincian Utang Belanja Pegawai

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31-Des-2023 (Rp)
1	Utang Gaji dan Tunjangan		3,094,599.00
2	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan	47,307,110.00	45,039,745.00
3	Utang Belanja TPG PNSD		
4	Utang Belanja Tamsil Guru PNSD		
5	Utang Jasa Pelayanan/Pegawai BLUD		
6	Utang Insentif Pajak dan Retribusi		
	Total	47,307,110.00	48,134,344.00

5.3.2.1.5.2. Utang Belanja Barang dan Jasa

Utang Belanja Barang dan Jasa Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp890,000.00 dan Rp468,700.00 Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.71. Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	890,000.00	468,700.00
2	Utang Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		
3	Utang Bahan cetak		
4	Utang Alat Tulis Kantor		
5	Dst....		
	Total	890,000.00	468,700.00

5.3.3 EKUITAS

Nilai ekuitas akhir Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp 9,200,829,236.00 dan Rp 9,196,294,304.00. Nilai ekuitas meningkat senilai Rp 4,534,932.00 atau sebesar 1% di dibandingkan dengan saldo nilai ekuitas akhir per 31 Desember 2023 yang sebesar Rp 9,196,294,304.00.

5.4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan informasi ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Kantor Camat Janapria untuk kegiatan penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah dalam satu periode pelaporan Laporan Operasional Kantor Camat Janapria Tahun 2024 dan 2023 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.4.1 BEBAN

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp2,937,720,418.83 dan Rp2,870,170,488.00. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian saldo Beban yang diakui oleh Kantor Camat Janapria selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.92. Rincian Beban

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Beban Operasional	2,937,720,418.83	2,870,170,488.00
2	Beban Transfer	0,00	0,00
3	Beban Tak Terduga	0,00	0,00
Jumlah		2,937,720,418.83	2,870,170,488.00

5.4.1.1 OPERASIONAL

Beban Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp2,937,720,418.83 dan Rp2,870,170,488.00. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Operasional Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian saldo Beban Operasional yang diakui oleh ... selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.93. Rincian Beban Operasional

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1	Beban Pegawai	2,091,167,393.00	2,067,394,417.00
2	Beban Barang dan Jasa	744,394,139.83	693,738,585.00
3	Beban Bunga	0,00	0,00
4	Beban Hibah	0,00	0,00
5	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00
6	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00
11	Beban Penyusutan dan Amortisasi	102,158,886.00	109,037,486.00
Jumlah		2,937,720,418.83	2,870,170,488.00

5.4.1.1.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai untuk tahun 2024 dan 2023 senilai Rp2,091,167,393.00 dan Rp2,067,394,417.00. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Pegawai Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Pegawai yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.94. Rincian Beban Pegawai

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1,420,527,663.00	1.463.255.989
	a. Beban Gaji Pokok ASN	1,117,534,025.00	1.140.012.600
	b. Beban Tunjangan Keluarga ASN	128,018,642.00	136.657.652
	c. Beban Tunjangan Jabatan ASN	78,370,000.00	75.480.000
	d. Beban Tunjangan Fungsional ASN		
	e. Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	29,788,000.00	34.370.000
	f. Beban Tunjangan Beras ASN	64,308,960.00	73.071.780
	g. Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2,494,993.00	3.645.672
	h. Beban Pembulatan Gaji ASN	13,043.00	18.285
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	667,825,730.00	601.324.428,00
	a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	667,825,730.00	601.324.428,00
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2,814,000.00	2,814,000.00
	a. Beban Honorarium	2,814,000.00	2,814,000.00
Jumlah		2,091,167,393.00	2.067.394.417.00

Penjelasan:

- Perubahan nilai Beban Pegawai Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:
 - Kenaikan gaji PNS sebesar 8%
 - Terdapat 4 Pegawai Kantor Camat Janapria kenaikan gaji berkala
- Pengakuan Beban Pegawai dalam LO Tahun 2024 ini lebih besar dari saldo Belanja Pegawai dalam LRA TA 2023 sebesar Rp23,772,976.00 (Rp2,091,167,393.00 - Rp2.067.394.417.00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Pegawai dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.95. Penjelasan Selisih Beban Pegawai LO

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	0,00
Penjelasan Selisih:	
Penambahan Beban LO:	
Utang Belanja Pegawai Tahun Berkenaan (N)	0
Utang Gaji dan Tunjangan	0,00
Utang Insentif Pajak dan Retribusi	0,00
Utang Jasa Pelayanan	0,00

Uraian	Nilai
Utang Tambahan Penghasilan PNS	47.307.110
Utang Tambahan Penghasilan Sertifikasi Guru	0,00
Reklasifikasi Atas Pembayaran Utang Barang dan Jasa (Jasa Pelayanan) Ke Utang Belanja Pegawai Jasa Pelayanan	0,00
Pengurangan Beban LO:	
Utang Belanja Pegawai (N-1)	
Utang Gaji dan Tunjangan	0,00
Utang Tambahan Penghasilan PNS/Sertifikasi Guru	0,00
Utang Insentif Pajak dan Retribusi	0,00
Utang Jasa Pelayanan BLUD dan Jasa pelayanan Kesehatan Bagi ASN	0,00
Jumlah Penjelasan Selisih	47.307.110

5.4.1.1.2 Beban Barang dan Jasa

Nilai beban barang dan Jasa Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023 masing senilai Rp 744,394,139.83 dan Rp 693,738,585.00. Rincian Nilai Barang dan Jasa Per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.96 Rincian Beban Barang dan Jasa

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
A	Beban Barang	384,777,959.00	439.487.232
1	Beban Barang Pakai Habis	384,777,959.00	439.487.232
2	Beban Barang Tak Habis Pakai	0,00	
3	Dst..		
B	Beban Jasa	162,115,563.00	127.093.573
1	Beban Jasa Kantor	105,004,756.00	48.146.698
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	432,000.00	432.000
	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	52,178,807.00	44.189.875
	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4,500,000.00	34.325.000
C	Beban Pemeliharaan	77,507,809.83	28.722.000
	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6,420,000.00	6.420.000
	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	71,087,809.83	22.302.000
D	Beban Perjalanan Dinas	76,492,808.00	12.735.780
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	76,492,808.00	12.735.780
E	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	43,500,000.00	85.700.000
	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	43,500,000.00	85.700.000
	Jumlah	744,394,139.83	693.738.585,00

Belanja Barang dan Jasa – LRA untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 terealisasi senilai Rp743,905,403.83, Sedangkan Realisasi Beban Barang dan Jasa untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp744,394,139.83.

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:
 - a. Penambahan 2 tenaga honorer di Kantor Camat Janapria.
2. Pengakuan Beban Barang dan Jasa dalam LO Tahun 2024 ini **lebih besar** dari saldo Belanja Barang dan Jasa dalam LRA TA 2024 sebesar Rp488.734 (Rp744,394,139.83. - Rp743,905,403.83). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Beban Barang dan Jasa dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.97 Penjelasan Selisih Beban Barang dan Jasa-LO

No	Uraian	Nilai
1	Selisih LO – LRA	0,00
	Penjelasan Selisih:	
2	Penambahan Beban LO:	
a	Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun Berjalan (Neraca)	1,481,436.00
b	Beban Barang dan Jasa Dibayar Dimuka Tahun 20NN-1 (Neraca)	0,00
c	Penggunaan Persediaan Barang Tahun 20NN-1 (Neraca)	0,00
d	Penggunaan Persediaan Barang Yang Bersumber dari Hibah	0,00
e	Reklas dari Aset Tetap-Brg Pakai Habis dan Reklas dari asset Tetap- <i>Extracomtable</i>	0,00
3	Pengurangan Beban LO:	
a	Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 20NN-1 (Neraca)	694,700.00
b	Beban Barang dan Jasa Dibayar Dimuka Tahun Berjalan (Neraca)	0,00
c	Persediaan Barang Tahun Berjalan (Neraca)	0,00
d	Reklas Belanja Barang dan Jasa ke Ke Aset Tetap	0,00
e	Reklas Persediaan Kadaluarasa	0,00
Jumlah Penjelasan Selisih		Rp488.734

5.4.1.2 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan amortisasi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2024 dan 2023 senilai masing-masing Rp102,158,886.00 dan Rp 109,037,486.00. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi yang diakui oleh Kantor Camat Janapria selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.105 Rincian Beban Peenyusutan dan Amortisasi

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	80,653,559.00	87,532,160.00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	21,150,639.00	21,150,639.00
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	354,688.00	354,688.00

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Dst...		
Jumlah	102,158,886.00	109,037,486.00

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:
 - a. Terdapat beberapa aset sudah habis umur ekonomis atau masa penyusutannya.
 - b.
2. Perbedaan pengakuan Beban Penyusutan dan Amortisasi dalam LO Tahun 2024 dengan selisih/perubahan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya serta perubahan saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud dari Tahun 2023 ke Tahun 2024 dalam Neraca per 31 Desember 2024 diungkapkan dalam CaLK.

5.4.2 SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL

Berdasarkan Pendapatan dan Beban Operasional yang telah diuraikan sebelumnya, diketahui Surplus Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 adalah senilai masing-masing Rp0,00 dan Rp0,00 terdiri dari:

Tabel 5.111 Rekapitulasi Perhitungan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Pendapatan-LO	0,00	0,00
2	Beban-LO	2,937,720,418.83	2,870,170,488.00
	Surplus/(Defisit) Operasional	(2,937,720,418.83)	(2,870,170,488.00)

5.4.6. SURPLUS/(DEFISIT) - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus/(Defisit) - LO Tahun 2024 dan 2023 yang dihitung dari:

Tabel 5.116 Rincian Surplus/(Defisit) – LO

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Kegiatan Operasional		
➤ Pendapatan Daerah – LO	0,00	0,00
✓ Pendapatan Asli Daerah – LO	0,00	0,00
✓ Pendapatan Transfer – LO	0,00	0,00
✓ Lain-Lain Pendapatan yang Sah – LO	0,00	0,00
➤ Beban Operasional	2,937,720,418.83	2,870,170,488.00
✓ Beban Operasional	2,937,720,418.83	2,870,170,488.00
➤ Beban Transfer	0,00	0,00
✓ Beban Transfer	0,00	0,00

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Surplus/(Defisit) dari kegiatan Operasional	(2,937,720,418.83)	(2,870,170,488.00)
Kegiatan Non-Operasional		
➤ Surplus Non-Operasional	0,00	0,00
✓ Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar – LO	-	-
✓ Surplus dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya – LO	0,00	0,00
➤ Defisit Non-Operasional	0,00	0,00
✓ Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar – LO	0,00	0,00
✓ Defisit dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00
Surplus/(Defisit) Non Operasional	0,00	0,00
Pos Luar Biasa	0,00	0,00
✓ Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
✓ Beban Luar Biasa	0,00	0,00
Surplus/(Defisit) Pos Luar Biasa	0,00	0,00
Jumlah	(2,937,720,418.83)	(2,870,170,488.00)

5.6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas (dalam satuan mata uang Rupiah) dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.6.1. Ekuitas Awal

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas saldo Ekuitas Awal Tahun 2024 dan 2023 yang hanya terdiri dari:

Tabel 5.131 Ekuitas Awal - LO

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Ekuitas Awal	9,196,294,304.00	9,249,616,818.00

Kantor Camat Janapria menyajikan saldo Ekuitas Awal Tahun 2024 dan 2023 yang merupakan Saldo Ekuitas Akhir tahun 2023 dan 2022 pada **Kantor Camat Janapria** yang disajikan dalam LPE pada masing-masing tahun berkenaan.

5.6.2. Surplus/(Defisit)-LO

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Surplus/(Defisit) - LO Tahun 2024 dan 2023 yang hanya terdiri dari:

Tabel 5.132 Surplus/(Defisit)-LO

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Surplus/(Defisit) Kegiatan Operasional	-2,937,720,418.83	-2,870,170,488.00
Surplus/(Defisit) dari kegiatan Non Operasional		
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa		
Surplus/(Defisit) – LO	-2,937,720,418.83	-2,870,170,488.00

Pada Tahun 2024 dan 2023 Kantor Camat Janapria masing-masing memiliki surplus dan defisit atas kegiatan operasional dan non operasional serta atas kejadian luar biasa yang berpengaruh terhadap kas maupun tanpa mempengaruhi posisi kas atau merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024. Saldo Surplus/(Defisit)-LO yang disajikan di atas sama dengan nilai saldo Surplus/(Defisit)-LO yang disajikan dalam LO sebagaimana telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LO pada *point 5.4.6*.

5.6.3. R/K PPKD (Khusus untuk SKPD)

Akun R/K PPKD digunakan untuk mencatat ekuitas pemerintah daerah yang berada dan dicatat pada setiap SKPD untuk dikonsolidasikan. Nilai R/K PPKD yang akan dikonsolidasikan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing senilai Rp 2,942,255,350.83 dan Rp 2,816,847,974.00.

5.6.4 Ekuitas Akhir

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas saldo Ekuitas Akhir milik Kantor Camat Janapria Per 31 Desember 2024 dan 2023.

Tabel 5.141 Rincian Ekuitas Akhir

Uraian	Tahun 2024	Tahun 20N23
Saldo Ekuitas Akhir	9,200,829,236.00	9,196,294,304.00

Saldo ekuitas akhir yang tersaji dalam Laporan Ekuitas ini sama besarnya dengan nilai Ekuitas yang tersaji di Neraca per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagaimana dijelaskan pada Penjelasan atas Pos-Pos Neraca.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Gambaran Umum OPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah, Kantor Camat Janapria berperan sebagai unsur pelaksana kewenangan otonomi daerah.

Tugas pokok Kecamatan Janapria adalah melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah yang dilimpahi oleh Bupati Kepada Camat sebagai perangkat daerah. Sementara itu untuk melaksanakan tugas pokoknya tersebut, Kecamatan Batukliang menyelenggarakan fungsi-fungsi :

➤ CAMAT

Camat mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan mengatur, mengendalikan dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan kewenangan Pemerintah Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas Camat mempunyai fungsi:

(1) Camat mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, merencanakan, mengendalikan dan mengawasi seluruh kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan Pemerintah Daerah yang didelegasikan oleh Bupati.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mempunyai fungsi:

- ✓ Perumusan dan penetapan rencana strategis dan program kerja kecamatan;
- ✓ Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Penetapan Kinerja Kecamatan;
- ✓ Pembinaan manajemen keuangan dan kepegawaian lingkup Kecamatan;
- ✓ Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas Kecamatan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan atau instansi terkait;
- ✓ Pelaksanaan pembinaan pelayanan teknis administratif kepada seluruh unit kerja;
- ✓ Perumusan kebijakan teknis kewilayahan sesuai lingkup tugasnya;
- ✓ Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan;
- ✓ Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
- ✓ Pembinaan, supervisi, fasilitasi, konsultasi dan pengawasan pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;

- ✓ Fasilitasi pelaksanaan kerja sama antar desa/ kelurahan ataupun kerja sama desa/ kelurahan dengan pihak ketiga;
- ✓ Pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau pegawai Kelurahan;
- ✓ Pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah;
- ✓ Pelaksanaan Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- ✓ Perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan publik;
- ✓ Pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- ✓ Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- ✓ Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- ✓ Pembinaan administrasi kependudukan lingkup kecamatan;
- ✓ Pemberian pertimbangan terhadap penetapan perijinan dan rekomendasi teknis tertentu sesuai peraturan perundang-undang;
- ✓ Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan dibidang Pemerintahan, bidang pemberdayaan masyarakat, bidang ketentraman dan ketertiban, bidang ekonomi Pembangunan dan bidang kesejahteraan rakyat;
- ✓ Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- ✓ Koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- ✓ Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
- ✓ Pengkoordinasian pelaksanaan musyawarah pembangunan di desa/ kelurahan dan tingkat Kecamatan;
- ✓ Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- ✓ Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- ✓ Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

6.2 Sumber Daya Kantor Camat Janapria

Jumlah Pegawai pada Kantor Camat Janapria Kabupaten Lombok

Tengah kondisi 31 Desember 2024 adalah sebanyak 20 orang sebagaimana dapat

dijabarkan dalam tabel data pegawai berikut :

DATA PEGAWAI OPD KANTOR CAMAT JANAPRIA

Keadaan : 31 Desember 2024

NO	JENIS /KUALIFIKASI	JUMLAH
1	ESELON: a. II.b b. III.a c. III.b d. IV.a e. IV.b	0 1 1 5 2
2	JABATAN FUNGSIONAL: a. b. c.	0 0 0
3	PANGKAT /GOLONGAN: a. IV b. III c. II d. I	4 13 5 0
4.	JENJANG PENDIDIKAN: a. S3 b. S2 c. S1/DIV d.DIII e. SMA sederajat f. Paket A	0 0 15 1 5 0

BAB VI
PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan CALK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kantor Camat Janapria Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 secara keseluruhan.

Lombok Tengah, 16 Januari 2025

PLT Camat Janapria



LALU MARZAWAN SUPRIYADI, S.Sos

NIP. 197102251994021002



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Kantor Camat Janapria
LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN TH 2024

No	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
1	2.1.06.02.02.0063	Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	468,700	-
	8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	-	468,700
		Jurnal Penyesuaian atas pembayaran utang Barang dan Jasa Th 2023 di Tahun 2024		
2	8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	890,000	-
	2.1.06.02.02.0063	Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	-	890,000
		Jurnal Penyesuaian atas pengakuan adanya utang Barang dan Jasa Th 2024 dan Belum di Bayar sd Desember 2024 yang akan di bayarkan di tahun berikutnya		
3	2.1.06.01.02.0001	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tam	45,039,745	-
	8.1.01.02.01.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	-	45,039,745
		Jurnal Penyesuaian atas pembayaran utang TPP Th 2023 yang dibayarkan Tahun 2024		
4	2.1.06.01.02.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	47,307,110	-
	8.1.01.02.01.0001	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	-	47,307,110
		Jurnal Penyesuaian atas pengakuan adanya utang TPP Th 2024 dan Belum di Bayar sd Desember 2024 yang akan di bayarkan di tahun berikutnya		
5	2.1.06.01.01.0001	Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	2,928,720	-
	2.1.06.01.01.0003	Utang Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	165,729	-
	2.1.06.01.01.0015	Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PNS	150	-
	8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	-	2,928,720
	8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	-	165,729
	8.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	-	150
		Jurnal Penyesuaian atas pembayaran utang gaji dan tunjangan pegawai Th 2023 yang dibayarkan Tahun 2024		
6	1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	55,000	-
		Bahan Komputer	298,000	-
	8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	-	55,000
	8.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	-	298,000
		Jurnal Penyesuaian atas pengakuan sisa persediaan barang habis pada periode tahun berkenaan berdasarkan berita acara hasil opname persediaan		
7	8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	420,436	-
	1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	-	420,436
		Jurnal Penyesuaian atas pengakuan pemakaian sisa persediaan barang pakai habis pada periode tahun lalu yang digunakan tahun berkenaan		
8	8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	171,000	-
	1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	-	171,000
		Jurnal Penyesuaian atas pengakuan pemakaian sisa persediaan barang pakai habis pada Semester I tahun berkenaan		
9	8.1.08.01.02.0002	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	31,200,977	-
	8.1.08.01.02.0004	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	825,000	-
	8.1.08.01.05.0004	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	2,383,050	-
	8.1.08.01.05.0005	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1,782,183	-
	8.1.08.01.05.0006	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	12,457,485	-
	8.1.08.01.05.0009	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	863,332	-
	8.1.08.01.05.0011	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4,974,067	-

	8.1.08.01.05.0013	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	320,000	-
	8.1.08.01.05.0019	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	385,933	-
	8.1.08.01.06.0002	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	750,000	-
	8.1.08.01.06.0007	Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	600,000	-
	8.1.08.01.10.0002	Beban Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	17,046,750	-
	8.1.08.01.10.0006	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	7,064,782	-
		Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	-	31,200,977
		Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	-	825,000
		Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	-	2,383,050
		Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	-	1,782,183
		Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	-	12,457,485
		Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	-	863,332
		Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	-	4,974,067
		Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	-	320,000
		Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	-	385,933
		Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	-	750,000
		Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	-	600,000
		Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	-	17,046,750
		Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	-	7,064,782
		<i>Jurnal Penyesuaian atas pengakuan beban penyusutan aset tetap peralatan dan mesin</i>		
10	8.1.08.02.01.0001	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	16,759,019	-
	8.1.08.02.01.0040	Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	2,742,040	-
	8.1.08.02.04.0004	Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas-Pagar	1,649,580	-
		Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	-	16,759,019
		Akumulasi Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	-	2,742,040
		Akumulasi Penyusutan Tugu/Tanda Batas-Pagar	-	1,649,580
		<i>Jurnal Penyesuaian atas pengakuan beban penyusutan aset tetap Bangunan Gedung</i>		
11	8.1.08.03.04.0007	Beban Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	354,688	-
		Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	-	354,688
		<i>Jurnal Penyesuaian atas pengakuan beban penyusutan aset tetap Jaringan, Instalasi</i>		
JUMLAH			199,903,476.00	199,903,476.00

PEMERINTAHAN KAB. LOMBOK TENGAH

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KONSOLIDASI)

TAHUN ANGGARAN 2024

01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	$5 = \frac{(4 / 3) * 100}{100}$	6
4	PENDAPATAN DAERAH	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.01	Pajak Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.01.06	Pajak Hotel	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel				
4.1.01.06.03	Pajak Losmen	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.01.06.03.0001	Pajak Losmen				
4.1.01.07	Pajak Restoran	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya				
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya				
4.1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.01.07.03.0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya				
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya				
4.1.01.08	Pajak Hiburan	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan				
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebu	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)				
4.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.01.08.10.0001	Pajak Pertandingan Olahraga				
4.1.01.09	Pajak Reklame	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron				
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain				
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri				
4.1.01.11	Pajak Parkir	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir				
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah				
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet				
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya				
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.01.15.01	PBBP2	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2				
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak				
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu [(I),PBJT],	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran				
4.1.01.19.01.0002	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering				
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain				
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel				
4.1.01.19.03.0002	PBJT-Hostel				
4.1.01.19.03.0003	PBJT-Vila				
4.1.01.19.03.0006	PBJT-Losmen				
4.1.01.19.03.0008	PBJT-Pesanggarahan				
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir				

4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.01.19.05.0007	PBJT-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor				
4.1.01.19.05.0009	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran				
4.1.01.19.05.0011	PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi				
4.1.01.19.05.0012	PBJT-Distkotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa				
4.1.02	Retribusi Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas				
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis				
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan				
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum				
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran				
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los				
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor				
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus				
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekom	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi				
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan				
4.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah				
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan				
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium				
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat				
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.02.02.02.0001	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan				
4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan				
4.1.02.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.02.02.03.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan				
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan				
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga				
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman				
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan				
4.1.02.02.11.0004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan				
4.1.02.02.12	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pas	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.02.02.12.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya				
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.02.03.02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.02.03.02.0001	Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol				
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angk	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum				
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung				
4.1.02.03.08	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.02.03.08.0001	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)				
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daer	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.04.08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.04.08.01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara				
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Neger	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain				
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain				
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Peke	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Peke	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan				
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.04.12.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.04.12.06.0001	Pendapatan Denda Pajak Hotel				
4.1.04.12.06.0003	Pendapatan Denda Pajak Losmen				
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.04.12.07.0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya				
4.1.04.12.07.0002	Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya				
4.1.04.12.07.0003	Pendapatan Denda Pajak Kafetaria dan Sejenisnya				
4.1.04.12.11	Pendapatan Denda Pajak Parkir	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.04.12.11.0001	Pendapatan Denda Pajak Parkir				
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2				

4.1.04.12.16	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Ba	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.04.12.16.0001	Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak				
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.04.13.01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.04.13.01.0045	Pendapatan Denda Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi				
4.1.04.13.03	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.04.13.03.0001	Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan				
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran G	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.04.15.03.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan				
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran P	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa				
4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran B	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.04.15.08.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS				
4.1.04.15.08.0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS				
4.1.04.15.10	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran B	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.04.15.10.0052	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD-Tamsil Guru PNSD				
4.1.04.15.15	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran B	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.04.15.15.0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				
4.1.04.15.16	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran B	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.04.15.16.0041	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik				
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD				
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan				
4.1.04.16.04	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lai	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.04.16.04.0001	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain				
4.1.04.16.06	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang S	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.04.16.06.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Giro				
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (J	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.04.18.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.04.18.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP				
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.01	Pendapatan Hibah	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.01.01.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat				
4.3.01.05	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.01.05.01	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.01.05.01.0001	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis				
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (J	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Rumah Sakit Non BLUD				
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN	0.00	0.00	0.00	0.00
5	BELANJA DAERAH	3,018,630,153.00	2,942,255,350.83	40.76	2,816,847,974.00
5.1	BELANJA OPERASI	2,912,093,998.00	2,835,900,030.83	36.77	2,753,934,174.00
5.1.01	Belanja Pegawai	2,147,278,931.00	2,091,994,627.00	10.66	2,058,634,309.00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1,470,242,431.00	1,423,622,262.00	8.68	1,460,161,390.00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1,155,274,526.00	1,120,462,745.00	0.97	1,137,083,880.00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1,155,274,526.00	1,120,462,745.00	0.97	1,137,083,880.00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK				
5.1.01.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	134,337,331.00	128,184,371.00	2.95	136,491,923.00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	134,337,331.00	128,184,371.00	0.95	136,491,923.00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK				
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	78,370,000.00	78,370,000.00	1.00	75,480,000.00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	78,370,000.00	78,370,000.00	1.00	75,480,000.00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS				
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK				
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	31,785,000.00	29,788,000.00	0.94	34,370,000.00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	31,785,000.00	29,788,000.00	0.94	34,370,000.00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK				
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	67,785,120.00	64,308,960.00	0.95	73,071,780.00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	67,785,120.00	64,308,960.00	0.95	73,071,780.00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK				
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2,676,345.00	2,494,993.00	0.93	3,645,672.00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2,676,345.00	2,494,993.00	0.93	3,645,672.00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	14,109.00	13,193.00	0.94	18,135.00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14,109.00	13,193.00	0.94	18,135.00

5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK				
5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS				
5.1.01.01.09.0002	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK				
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS				
5.1.01.01.10.0002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK				
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS				
5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK				
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	674,222,500.00	665,558,365.00	0.99	595,658,919.00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	674,222,500.00	665,558,365.00	0.99	595,658,919.00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	674,222,500.00	665,558,365.00	0.99	595,658,919.00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK				
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS				
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objek	2,814,000.00	2,814,000.00	1.00	2,814,000.00
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel				
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran				
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame				
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan				
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir				
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah				
5.1.01.03.01.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet				
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan				
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan				
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan				
5.1.01.03.01.0019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu ((I,PBJT),				
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Dae	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan				
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan				
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum				
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar				
5.1.01.03.02.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor				
5.1.01.03.02.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi				
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah				
5.1.01.03.02.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan				
5.1.01.03.02.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan				
5.1.01.03.02.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan				
5.1.01.03.02.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga				
5.1.01.03.02.0024	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah				
5.1.01.03.02.0026	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol				
5.1.01.03.02.0031	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung				
5.1.01.03.02.0032	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)				
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD				
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD				
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN				
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2,814,000.00	2,814,000.00	1.00	2,814,000.00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keua	2,814,000.00	2,814,000.00	1.00	2,814,000.00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBI)				
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan				
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan				
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD				
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD				
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD				
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD				
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD				
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD				
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Ang	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD				
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD				
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD				

5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.01.04.12.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi DPRD				
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD				
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD				
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD				
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD				
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD				
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH				
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH				
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH				
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH				
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH				
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH				
5.1.01.05.07	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.01.05.07.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH				
5.1.01.05.08	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.01.05.08.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH				
5.1.01.05.09	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.01.05.09.0001	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH				
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD				
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH				
5.1.01.88	Belanja Pegawai BOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.01.88.88	Belanja Pegawai BOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.01.88.88.8888	Belanja Pegawai BOS				
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	764,815,067.00	743,905,403.83	26.11	695,299,865.00
5.1.02.01	Belanja Barang	385,010,788.00	384,710,523.00	10.97	439,907,668.00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	385,010,788.00	384,710,523.00	10.97	439,907,668.00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi				49,910,000.00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia				
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	57,407,000.00	57,384,600.00	1.00	73,419,450.00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku				
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman				
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas				
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan				
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1,971,896.00	1,971,896.00	1.00	0.00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan				
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar				
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran				
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian				
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel				
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya				
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	17,079,795.00	16,965,245.00	0.99	26,722,294.00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Copy	168,650.00	168,000.00	1.00	0.00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3,193,200.00	3,163,200.00	0.99	0.00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos				
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komput	1,115,680.00	1,112,000.00	1.00	0.00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2,373,194.00	2,373,194.00	1.00	1,458,694.00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4,285,079.00	4,271,500.00	1.00	5,257,230.00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas				
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga				
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata				
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya				
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat				
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya				
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	60,539,426.00	60,526,600.00	1.00	0.00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya				
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura				
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan				
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya				
5.1.02.01.01.0049	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya				
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	226,077,580.00	225,975,000.00	1.00	253,540,000.00
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh				

5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan				
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH				
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD				
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)				
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)				
5.1.02.01.01.0068	Belanja Pakaian Siaga				
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional				
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga				
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	10,799,288.00	10,799,288.00	1.00	29,600,000.00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapital	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.02.01.04.0117	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya				
5.1.02.01.04.0207	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran-Bedah				
5.1.02.01.04.0545	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman				
5.1.02.02	Belanja Jasa	167,666,279.00	161,694,263.00	9.59	128,234,417.00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	110,256,020.00	104,583,456.00	6.39	49,287,542.00
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	1,200,000.00	1,200,000.00	1.00	0.00
5.1.02.02.01.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan				
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim	12,000,000.00	12,000,000.00	1.00	18,000,000.00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara				
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan				
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan				
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian				
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan				
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan				
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan				
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium				
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat				
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan				
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi				
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	60,250,000.00	60,250,000.00	1.00	0.00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli				
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan				14,450,000.00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan				
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir				
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveilliance ISO				
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	10,800,000.00	10,800,000.00	1.00	0.00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias				
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi				
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan				
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi				
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara				
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi				
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi				
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan				
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon				
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air				
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	11,836,000.00	7,117,675.00	0.60	8,263,335.00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah				
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	10,680,000.00	10,365,000.00	0.97	6,325,000.00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman				
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya				
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	3,490,020.00	2,850,781.00	0.82	2,249,207.00
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah				
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up				
5.1.02.02.01.0077	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN				
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	720,000.00	432,000.00	1.20	432,000.00
5.1.02.02.02.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa				
5.1.02.02.02.0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI				
5.1.02.02.02.0003	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPJ dan BP Kelas 3				
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPJ dan BP Kelas 3				
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN				
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	317,880.00	191,999.00	0.60	190,728.00
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	402,120.00	240,001.00	0.60	241,272.00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.02.02.03.0030	Belanja Sewa Tanah untuk Latihan				
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	52,190,259.00	52,178,807.00	1.00	44,189,875.00
5.1.02.02.04.0003	Belanja Sewa Excavator				
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang				
5.1.02.02.04.0112	Belanja Sewa Alat Pengolahan Lainnya				
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya				
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	52,190,259.00	52,178,807.00	1.00	44,189,875.00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio				
5.1.02.02.04.0411	Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya				
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor				

5.1.02.02.05.0011	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga				
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel				
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya				
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.02.02.07.0031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya				
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural				
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya				
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur				
5.1.02.02.08.0028	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian				
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik				
5.1.02.02.09.0020	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisata				
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1				
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis se	4,500,000.00	4,500,000.00	1.00	34,325,000.00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan				
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi				34,325,000.00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	4,500,000.00	4,500,000.00	1.00	0.00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan				
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	78,120,000.00	77,507,809.83	2.99	28,722,000.00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6,420,000.00	6,420,000.00	2.00	6,420,000.00
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator				
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya				
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat	3,500,000.00	3,500,000.00	1.00	0.00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua				
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga				
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor				
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya				
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin				
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Ala	2,920,000.00	2,920,000.00	1.00	3,500,000.00
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan				
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer				
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer				2,920,000.00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya				
5.1.02.03.02.0492	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar				
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	71,700,000.00	71,087,809.83	0.99	22,302,000.00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedu	71,700,000.00	71,087,809.83	0.99	22,302,000.00
5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum				
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman				
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.02.03.04.0023	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya				
5.1.02.03.04.0026	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi				
5.1.02.03.04.0079	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya				
5.1.02.03.04.0083	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya				
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	90,518,000.00	76,492,808.00	1.55	12,735,780.00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	90,518,000.00	76,492,808.00	1.55	12,735,780.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	29,138,000.00	16,972,808.00	0.58	12,735,780.00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	61,380,000.00	59,520,000.00	0.97	0.00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak	43,500,000.00	43,500,000.00	1.00	85,700,000.00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak L	43,500,000.00	43,500,000.00	1.00	85,700,000.00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	43,500,000.00	43,500,000.00	1.00	85,700,000.00
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)				
5.1.02.05.01.0006	Belanja Bantuan Fasilitas Premi Asuransi Pertanian				
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak La	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain				
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS				
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD				
5.1.05	Belanja Hibah	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat				
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemas	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat N	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Unda				
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukar	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar				
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukar	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan				
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik				
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	0.00	0.00	0.00	0.00

5.1.05.08.01	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.05.08.01.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS				
5.1.05.08.02	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.05.08.02.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD				
5.1.05.08.03	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.05.08.03.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan				
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada I	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu				
	JUMLAH BELANJA OPERASI	2,912,093,998.00	2,835,900,030.83	36.77	2,753,934,174.00
5.2	BELANJA MODAL	106,536,155.00	106,355,320.00	3.99	62,913,800.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	105,018,755.00	104,838,320.00	2.99	62,913,800.00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa				
5.2.02.01.03.0008	Belanja Modal Alat Pengolahan Air Kotor				
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya				
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan				
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang				
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga				
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus				
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.02.03.01.0010	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya				
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.02.03.02.0005	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)				
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal				
5.2.02.03.03.0010	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara				
5.2.02.03.03.0015	Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor				
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.02.04.01.0008	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan				
5.2.02.04.01.0010	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya				
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	34,241,435.00	34,061,000.00	0.99	14,162,000.00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya				
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	34,241,435.00	34,061,000.00	0.99	14,162,000.00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	34,241,435.00	34,061,000.00	0.99	0.00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin				
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)				14,162,000.00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran				
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat				
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat				
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio				
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film				
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya				
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.02.06.02.0004	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio VHF				
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya				
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum				
5.2.02.07.01.0010	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak				
5.2.02.07.01.0015	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic				
5.2.02.07.01.0024	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU				
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya				
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya				
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.02.08.01.0006	Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi				
5.2.02.08.01.0019	Belanja Modal Alat Laboratorium Farmasi				
5.2.02.08.01.0064	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya				
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.02.08.03.0005	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah				
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya				
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.02.08.07.0001	Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah				
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	70,777,320.00	70,777,320.00	2.00	48,751,800.00

5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	59,880,000.00	59,880,000.00	1.00	45,717,000.00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer				
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	59,880,000.00	59,880,000.00	1.00	45,717,000.00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	10,897,320.00	10,897,320.00	1.00	3,034,800.00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer				
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan				
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	10,897,320.00	10,897,320.00	1.00	3,034,800.00
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.02.11.02.0002	Belanja Modal Elektronik/Electric				
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.02.15.02.0005	Belanja Modal Sepatu Lapangan				
5.2.02.17	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.02.17.01	Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.02.17.01.0026	Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya				
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.02.18.01.0001	Belanja Modal Rambu Bersuar				
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar				
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan				
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS				
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.02.89.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.02.89.01.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler				
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD				
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor				
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan				
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan				
5.2.03.01.01.0016	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan				
5.2.03.01.01.0028	Belanja Modal Bangunan Industri				
5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan				
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum				
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir				
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman				
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya				
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar				
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD				
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1,517,400.00	1,517,000.00	1.00	0.00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten				
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya				
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten				
5.2.04.01.02.0005	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa				
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya				
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.04.02.07.0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor				
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	1,517,400.00	1,517,000.00	1.00	0.00
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.04.03.01.0004	Belanja Modal Instalasi Air Tanah Dangkal				
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya				
5.2.04.03.05	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	1,517,400.00	1,517,000.00	1.00	0.00
5.2.04.03.05.0009	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)				
5.2.04.03.05.0012	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	1,517,400.00	1,517,000.00	1.00	0.00
5.2.04.03.06	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.04.03.06.0004	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Lainnya				
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya				
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00

5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum				
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Ol	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik				
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.05.08.01.0002	Belanja Modal Lisensi dan Franchise				
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS				
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software				
	JUMLAH BELANJA MODAL	106,536,155.00	106,355,320.00	3.99	62,913,800.00
	JUMLAH BELANJA	3,018,630,153.00	2,942,255,350.83	40.76	2,816,847,974.00
	SURPLUS/DEFISIT	-3,018,630,153.00	-2,942,255,350.83	-40.76	-2,816,847,974.00
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerj	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerj	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja				
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1.01.08.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD				
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0.00	0.00	0.00	0.00
	PEMBIAYAAN NETTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	-3,018,630,153.00	-2,942,255,350.83	-40.76	-2,816,847,974.00

NERACA KONSOLIDASI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN 2024

Kode Rekening	URAIAN	NERACA 2024	Penyesuaian		NERACA 2023
			Debet	Kredit	
	ASET				
1.1	ASET LANCAR				
1.1.01	Kas dan Setara Kas	-			-
1.1.01.01.01	Kas di Kas Daerah	-			
1.1.01.02.01	Kas Bendahara Penerimaan	-			
1.1.01.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	-			
1.1.01.04.01	Kas di BLUD	-			
1.1.01.05.01	Kas di Bendahara BOS	-			
1.1.01.06.01	Kas di bendahara Puskesmas (FKTP)	-			
1.1.01.07.01	Kas Lainnya	-			
1.1.01.09.01	Kas Dana Desa	-			
1.1.01.10.01	Kas Dana BOSP	-			
1.1.01.11.01	Kas Dana BOK Puskesmas	-			
1.1.02	Investasi Jangka Pendek	-			
	Investasi Jangka Pendek	-			
	Piutang Pendapatan	-			-
1.1.03	Piutang Pajak	-			-
1.1.03.06.01.0001	Piutang Pajak Hotel	-			
1.1.03.06.03.0001	Piutang Pajak Losmen	-			
1.1.03.06.07.0001	Piutang Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisny	-			
1.1.03.07.01.0001	Piutang pajakRestoran dan sejenisnya	-			
1.1.03.07.02.0001	Piutang Pajak Rumah Makan dan sejenisnya	-			
1.1.03.07.03.0001	Piutang pajak Cafeteria dan sejenisnya	-			
1.1.03.07.07.0001	Piutang Pajak Jasa Boga/Catring dan sejenisnya	-			
1.1.03.08.02.0001	Piutang Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	-			
1.1.03.08.03.0001	Piutang Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya	-			
1.1.03.08.08.0001	Piutang Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	-			
1.1.03.08.09.0001	Piutang Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	-			
1.1.03.08.10.0001	Piutang Pajak Pertandingan Olahraga	-			
1.1.03.09.01.0001	Piutang Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	-			
1.1.03.09.02.0001	Piutang pajak Reklame Kain	-			
1.1.03.09.03.0001	Piutang Reklame Melekat/Stiker	-			
1.1.03.10.01.0001	Piutang Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	-			
1.1.03.11.01.0001	Piutang Pajak Parkir	-			
1.1.03.12.01.0001	Piutang Pajak Air Tanah	-			
1.1.03.15.01.0001	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perko	-			
1.1.04	Piutang Retribusi	-			-
1.1.04.01.01.0001	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	-			
1.1.04.01.01.0006	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelaya	-			
1.1.04.01.13.0001	Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menar	-			
1.1.04.02.01.0001	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	-			
1.1.04.02.01.0002	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah	-			
1.1.04.02.02.0002	Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan y	-			
1.1.05	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-			-

1.1.05.02.01.0001	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	-			
1.1.05.02.03.0001	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	-			
1.1.06	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	-			-
1.1.06.09.01.0001	Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	-			
1.1.06.11.01.0001	Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksan	-			
1.1.06.12.06.0001	Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel	-			
1.1.06.12.07.0001	Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran	-			
1.1.06.12.16.0001	Piutang Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tan	-			
1.1.06.13.01.0045	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pengawasan dan P	-			
1.1.06.13.02.0001	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekaya	-			
1.1.06.13.03.0016	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Persetujuan Bangu	-			
1.1.06.15.03.0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pemb	-			
1.1.06.16.02.0001	Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	-			
1.1.07	Piutang Transfer Pemerintah Pusat				
1.1.08	Piutang Transfer Antar Daerah	-			-
1.1.08.01.01	Piutang Bagi Hasil Pajak	-			-
1.1.08.01.01.0001	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-			
1.1.08.01.01.0002	Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermot	-			
1.1.08.01.01.0003	Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Berm	-			
1.1.08.01.01.0004	Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	-			
1.1.09	Piutang Lainnya	-			-
1.1.09.05	Uang Muka	-			-
1.1.09.05.01	Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa	-			-
1.1.09.05.01.0001	Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa	-			
1.1.10	Penyisihan Piutang				
1.1.10.01.01	Penyisihan Piutang Pajak	-			-
1.1.10.01.01.0102	Penyisihan Piutang Pajak Reklame-Reklame Papan/Billbo	-			
1.1.10.01.01.0115	Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	-			
1.1.10.01.01.0154	Penyisihan Piutang PBBP2	-			
1.1.10.01.02	Penyisihan Piutang Retribusi	-			-
1.1.10.01.02.0006	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kese	-			
1.1.10.01.02.0032	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pengawasan da	-			
1.1.10.01.02.0033	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kek	-			
1.1.10.01.02.0034	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kek	-			
1.1.10.01.02.0041	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir da	-			
	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-			
	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah	-			
	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-			
	Uang Muka Kerja	-			

1.1.11	Beban di bayar dimuka	-			-
1.1.11.02.02.0138	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan P	-			
1.1.11.02.03.0001	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan	-			
1.1.12	Persediaan	353,000.00			420,436.00
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	353,000.00			420,436.00
1.1.12.01.01	Bahan	-			-
1.1.12.01.01.0005	Bahan Baku	-			
1.1.12.01.01.0010	Isi Tabung Gas	-			
1.1.12.01.01.0011	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	-			
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	-			
1.1.12.01.03	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	353,000.00			420,436.00
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	55,000.00	226,000.00	591,436.00	420,436.00
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	-			
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	-			
1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik	-			
	Bahan Komputer	298,000.00	298,000.00		
1.1.12.01.04	Obat-obatan	-			-
1.1.12.01.04.0001	Obat	-			
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya	-			
1.1.12.01.05	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	-			-
1.1.12.01.05.0001	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	-			
	JUMLAH ASET LANCAR	353,000.00			420,436.00
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG				
1.2.01	Investasi Non Permanen	-			-
1.2.01.05	Dana Bergulir	-			-
1.2.01.05.02.0001	Dana Bergulir	-			
	Penyisihan	-			
1.2.02	Investasi Permanen	-			-
1.2.02.01.01	Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten	-			-
1.2.02.01.01.0001	Penyertaan Modal kepada BUMD /Perusahaan Daerah	-			
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	-			-
1.3	ASET TETAP				
1.3.01	Tanah	8,266,952,000.00			8,266,952,000.00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	1,038,947,770.00	104,838,320.00		934,109,450.00
1.3.07.01	<i>Akm peny peralatan dan mesin</i>	(874,817,681.00)		80,653,559.00	(794,164,122.00)
1.3.03	Gedung dan Bangunan	1,257,173,000.00			1,257,173,000.00
1.3.07.02	<i>Akm peny gedung dan bangunan</i>	(465,192,305.00)		21,150,639.00	(444,041,666.00)
1.3.04	Jalan, Irigasi, dan Jembatan	15,704,500.00	1,517,000.00		14,187,500.00
1.3.07.03	<i>Akm peny jalan,irigasi dan jembatan</i>	(4,640,498.00)		354,688.00	(4,285,810.00)
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	-			
1.3.06	Konstruksi dalam Pengerjaan	-			
	JUMLAH ASET TETAP	9,234,126,786.00			9,229,930,352.00
1.6	PROPERTI INVESTASI	-			-
1.6.01	Properti Investasi Tanah	-			
1.6.02	Properti Investasi Gedung dan Bangunan	-			
1.6.04	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	-			
	DANA CADANGAN	-			-
	Dana Cadangan	-			-
	JUMLAH DANA CADANGAN	-			-
1.5	ASET LAINNYA				
1.5.01	Tagihan Jangka Panjang	-			-

1.5.01.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-		-
1.5.01.02.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah thd PN Bukan Bendaha	-		
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah thd Pihak Ketiga	-		
	Penyisihan TGR	-		
1.5.03	Aset Tak Berwujud	-		-
1.5.03.01.01.0005	Aset Tak Berwujud Lainnya	-		
	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	-		
1.5.04	Aset Lain-lain	14,546,560.00		14,546,560.00
1.5.04.01.01.0001	Aset Rusak Berat/Usang	14,546,560.00		14,546,560.00
1.5.04.01.01.0002	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Peme	-		
1.5.08.01.01	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	-		-
1.5.08.01.01.	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	-		-
1.5.08.01.01.0001	Dana Bagi Hasil TDF	-		
	JUMLAH ASET LAINNYA	14,546,560.00		14,546,560.00
	RK - SKPD			
	TOTAL ASET	9,249,026,346.00		9,244,897,348.00
2	KEWAJIBAN	-		-
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
2.1.01	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-		-
2.1.01.05.01.0001	Utang PPh 21	-		
2.1.01.05.02.0001	Utang PPh 22	-		
2.1.01.05.03.0001	Utang PPh 23	-		
2.1.01.06.01.0001	Utang PPN Pusat	-		
2.1.02	Utang Bunga	-		-
2.1.02.01.02.0001	Utang Bunga kepada pemerintah pusat	-		
2.1.04	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-		-
2.1.04.01.01.0001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-		
2.1.05	Pendapatan diterima dimuka	-		-
2.1.05.01.01.0001	Setoran Kelebihan Pembayaran dari Pihak III	-		
2.1.05.04.01.0002	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-	-		
2.1.05.04.01.0004	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-	-		
2.1.05.05.01.0001	Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Reklame Papan/ Billb	-		
2.1.06	Utang Belanja	48,197,110.00		48,603,044.00
2.1.06.01	Utang Belanja Pegawai	47,307,110.00		48,134,344.00
2.1.06.01.01	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	-		3,094,599.00
2.1.06.01.01.0001	Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	-	2,928,720.00	2,928,720.00
2.1.06.01.01.0002	Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PPPK	-		
2.1.06.01.01.0003	Utang Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Ke	-	165,729.00	165,729.00
2.1.06.01.01.0004	Utang Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Ke	-		
2.1.06.01.01.0005	Utang Belanja Tunjangan Jabatan ASN-Tunjangan Jab	-		
2.1.06.01.01.0007	Utang Belanja Tunjangan Fungsional ASN-Tunjangan F	-		
2.1.06.01.01.0009	Utang Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN-Tunj	-		
2.1.06.01.01.0010	Utang Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN- Tun	-		
2.1.06.01.01.0011	Utang Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras	-		
2.1.06.01.01.0012	Utang Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras	-		
2.1.06.01.01.0013	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	-		

2.1.06.01.01.0015	Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji	-	150.00		150.00
2.1.06.01.01.0016	Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji	-			
2.1.06.01.02	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	47,307,110.00			45,039,745.00
2.1.06.01.02.0001	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Bel	47,307,110.00	45,039,745.00	47,307,110.00	45,039,745.00
2.1.06.01.03	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan P	-			-
2.1.06.01.03.0015	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Paja	-			
2.1.06.01.03.0022	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Ret	-			
2.1.06.01.03.0047	Utang Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD- Tu	-			
2.1.06.01.03.0049	Utang Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru Ph	-			
2.1.06.01.03.0050	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN-Bel	-			
2.1.06.01.05	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	-			-
2.1.06.01.05.0038	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungu	-			
2.1.06.01.99	Utang Belanja Pegawai BLUD	-			-
2.1.06.01.99.9999	Utang Belanja Pegawai BLUD	-			
2.1.06.02	Utang Belanja barang dan Jasa	890,000.00			468,700.00
2.1.06.02.01	Utang Belanja Barang	-			-
2.1.06.02.01.0010	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Isi Tabung G	-			
2.1.06.02.01.0012	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Lainn	-			
2.1.06.02.01.0015	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Suku Cadang-Suku	-			
2.1.06.02.01.0016	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Suku Cadang-Suku	-			
2.1.06.02.01.0037	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-	-			
2.1.06.02.01.0038	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-	-			
2.1.06.02.01.0039	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual	-			
2.1.06.02.01.0052	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minu	-			
2.1.06.02.02	Utang Belanja Jasa	890,000.00			468,700.00
2.1.06.02.02.0060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	-			
2.1.06.02.02.0061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	-			
2.1.06.02.02.0063	Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV	890,000.00	468,700.00	890,000.00	468,700.00
2.1.06.02.02.0069	Utang Belanja Jasa Kantor-Pengolahan Air Limbah	-			
2.1.06.02.02.0078	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan K	-			
2.1.06.02.02.0233	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Ka	-			
2.1.06.02.03	Utang Belanja Pemeliharaan	-			-
2.1.06.02.03.0070	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat	-			
2.1.06.02.03.0152	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat	-			
2.1.06.02.03.0156	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat	-			
2.1.06.02.04	Utang Belanja Perjalanan Dinas	-			-
2.1.06.02.04.0001	Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Utang	-			
2.1.06.08	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-			-
2.1.06.08.01	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung	-			-
2.1.06.08.01.0001	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	-			
2.1.06.12	Utang Belanja Bagi Hasil	-			-
2.1.06.12.03.0001	Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerit	-			
2.1.06.12.04.0001	Utang Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/	-			
2.1.06.13	Utang Belanja Bantuan Keuangan	-			-
2.1.06.13.09.0003	Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/K	-			
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	48,197,110.00			48,603,044.00
2.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
2.2.01	Utang kepada Pemerintah Pusat	-			-
2.2.01.01	Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri	-			-
2.2.01.01.02.0001	Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka	-			
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-			-

	TOTAL KEWAJIBAN	48,197,110.00		48,603,044.00
	EKUITAS			
	TOTAL EKUITAS	9,200,829,236.00		9,196,294,304.00
	TOTAL KEWAJIBAN & EKUITAS DANA	9,249,026,346.00		9,244,897,348.00

Kode Rekening	Uraian	LRA RINCI	PENYESUAIAN		LO 2024
			D	K	
KEGIATAN OPERASIONAL					
7	PENDAPATAN	0.00			0.00
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	0.00			0.00
7.1.01	Pajak Daerah-LO	0.00			0.00
7.1.01.06	Pajak Hotel-LO	0.00			0.00
7.1.01.06.01	Pajak Hotel-LO	0.00			0.00
7.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel-LO				0.00
7.1.01.06.03	Pajak Losmen-LO	0.00			0.00
7.1.01.06.03.0001	Pajak Losmen-LO				0.00
7.1.01.07	Pajak Restoran-LO	0.00			0.00
7.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO	0.00			0.00
7.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO				0.00
7.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya-LO	0.00			0.00
7.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya-LO				0.00
7.1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya-LO	0.00			0.00
7.1.01.07.03.0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya-LO				0.00
7.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya-LO	0.00			0.00
7.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya-LO				0.00
7.1.01.08	Pajak Hiburan-LO	0.00			0.00
7.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan-	0.00			0.00
7.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan-LO				0.00
7.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness	0.00			0.00
7.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)-LO				0.00
7.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga-LO	0.00			0.00
7.1.01.08.10.0001	Pajak Pertandingan Olahraga-LO				0.00
7.1.01.09	Pajak Reklame-LO	0.00			0.00
7.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron-LO	0.00			0.00
7.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron-LO				0.00
7.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain-LO	0.00			0.00
7.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain-LO				0.00
7.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan-LO	0.00			0.00
7.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihilangkan Sendiri-LO	0.00			0.00
7.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihilangkan Sendiri-LO				0.00
7.1.01.11	Pajak Parkir-LO	0.00			0.00
7.1.01.11.01	Pajak Parkir-LO	0.00			0.00
7.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir-LO				0.00
7.1.01.12	Pajak Air Tanah-LO	0.00			0.00
7.1.01.12.01	Pajak Air Tanah-LO	0.00			0.00
7.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah-LO				0.00
7.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet-LO	0.00			0.00
7.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet-LO	0.00			0.00
7.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet-LO				0.00
7.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	0.00			0.00
7.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO	0.00			0.00
7.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO				0.00
7.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	0.00			0.00
7.1.01.15.01	PBBP2-LO	0.00			0.00
7.1.01.15.01.0001	PBBP2-LO				0.00
7.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	0.00			0.00
7.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak-LO	0.00			0.00
7.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak-LO				0.00
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	0.00			0.00
7.1.02.01	Retribusi Jasa Umum-LO	0.00			0.00
7.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	0.00			0.00
7.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas-LO				0.00
7.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis-LO				0.00
7.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO	0.00			0.00
7.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan -LO				0.00
7.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	0.00			0.00
7.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO				0.00
7.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	0.00			0.00
7.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran-LO				0.00
7.1.02.01.05.0002	Retribusi Los-LO				0.00
7.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	0.00			0.00
7.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO				0.00
7.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO	0.00			0.00
7.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO				0.00
7.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO	0.00			0.00
7.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO				0.00
7.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha-LO	0.00			0.00
7.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	0.00			0.00
7.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO				0.00
7.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah-LO				0.00
7.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan-LO				0.00
7.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium-LO				0.00
7.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat-LO				0.00
7.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LO	0.00			0.00
7.1.02.02.02.0001	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan-LO				0.00

7.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan-LO				0.00
7.1.02.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan-LO	0.00			0.00
7.1.02.02.03.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan-LO				0.00
7.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan-LO	0.00			0.00
7.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan-LO				0.00
7.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	0.00			0.00
7.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO				0.00
7.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	0.00			0.00
7.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman-LO				0.00
7.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan-LO				0.00
7.1.02.02.11.0004	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak dan Ikan-LO				0.00
7.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu-LO	0.00			0.00
7.1.02.03.02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol-LO	0.00			0.00
7.1.02.03.02.0001	Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol-LO				0.00
7.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO	0.00			0.00
7.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO				0.00
7.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0.00			0.00
7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO				0.00
7.1.02.03.08	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)-LO	0			0
7.1.02.03.08.0001	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)-LO	0			0.00
7.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	0.00			0.00
7.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas F	0.00			0.00
7.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas F	0.00			0.00
7.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO				0.00
7.1.04	Lain-lain PAD yang Sah-LO	0.00			0.00
7.1.04.05	Jasa Giro-LO	0.00			0.00
7.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	0.00			0.00
7.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah-LO				0.00
7.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO	0			0
7.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO	0			0.00
7.1.04.05.04	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS-LO	0.00			0.00
7.1.04.05.04.0001	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS-LO				0.00
7.1.04.07	Pendapatan Bunga-LO	0.00			0.00
7.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	0.00			0.00
7.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO				0.00
7.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	0.00			0.00
7.1.04.08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara-LO	0			0
7.1.04.08.01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara-LO	0			0.00
7.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Benda	0.00			0.00
7.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO				0.00
7.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	0.00			0.00
7.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	0.00			0.00
7.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO				0.00
7.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	0.00			0.00
7.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	0.00			0.00
7.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO				0.00
7.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	0.00			0.00
7.1.04.12.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel-LO	0.00			0.00
7.1.04.12.06.0001	Pendapatan Denda Pajak Hotel-LO				0.00
7.1.04.12.06.0003	Pendapatan Denda Pajak Losmen-LO				0.00
7.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran-LO	0.00			0.00
7.1.04.12.07.0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO				0.00
7.1.04.12.07.0002	Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya-LO				0.00
7.1.04.12.07.0003	Pendapatan Denda Pajak Kafetaria dan Sejenisnya-LO				0.00
7.1.04.12.11	Pendapatan Denda Pajak Parkir-LO	0.00			0.00
7.1.04.12.11.0001	Pendapatan Denda Pajak Parkir-LO				0.00
7.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	0.00			0.00
7.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2-LO				0.00
7.1.04.12.16	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHT	0.00			0.00
7.1.04.12.16.0001	Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak-LO				0.00
7.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	0.00			0.00
7.1.04.13.01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-LO	0.00			0.00
7.1.04.13.01.0013	Pendapatan Denda Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO				0.00
7.1.04.13.03	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-LO	0.00			0.00
7.1.04.13.03.0001	Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO				0.00
7.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian-LO	0.00			0.00
7.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0.00			0.00
7.1.04.15.03.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO				0.00
7.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0.00			0.00
7.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa-LO				0.00
7.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan	0.00			0.00
7.1.04.15.08.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok	0			0.00
7.1.04.15.08.0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS-LO				0.00
7.1.04.15.15	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-	0.00			0.00
7.1.04.15.15.0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas-LO				0.00
7.1.04.16	Pendapatan dari BLUD-LO	0.00			0.00
7.1.04.16.01	Pendapatan dari BLUD-LO	0.00			0.00
7.1.04.16.01.0001	Pendapatan dari BLUD-LO				0.00
7.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO	0			0
7.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO	0			0.00
7.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas	0.00			0.00
7.1.04.18.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	0.00			0.00
7.1.04.18.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO				0.00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	0.00			0.00

					0.00
7.2	PENDAPATAN TRANSFER-LO	0.00			0.00
	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
7.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	0.00			0.00
7.2.01.01	Dana Perimbangan-LO	0.00			0.00
7.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	0.00			0.00
7.2.01.01.01.0001	DBH PBB-LO				0.00
7.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21-LO				0.00
7.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WOPDN-LO				0.00
7.2.01.01.01.0004	DBH CHT-LO				0.00
7.2.01.01.01.0008	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO				0.00
7.2.01.01.01.0009	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO				0.00
7.2.01.01.01.0010	DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO				0.00
7.2.01.01.01.0013	DBH SDA Perikanan-LO				0.00
7.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	0.00			0.00
7.2.01.01.02.0001	DAU-LO				0.00
7.2.01.01.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan-LO	0			0.00
7.2.01.01.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan-LO	0			0.00
7.2.01.01.02.0007	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum-LO	0			0.00
7.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	0.00			0.00
7.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD-LO				0.00
7.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO				0.00
7.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO				0.00
7.2.01.01.03.0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB-LO				0.00
7.2.01.01.03.0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting-LO				0.00
7.2.01.01.03.0030	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM-LO				0.00
7.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian-LO				0.00
7.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan-LO				0.00
7.2.01.01.03.0033	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan-LO				0.00
7.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan-LO				0.00
7.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan-LO				0.00
7.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler-LO				0.00
7.2.01.01.03.0039	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan-LO				0.00
7.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler-LO				0.00
7.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan-LO				0.00
7.2.01.01.03.0045	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup-LO				0.00
7.2.01.01.03.0059	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit-LO				0.00
7.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan-LO				0.00
7.2.01.01.03.0062	DAK Fisik-Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah-Penugasan-LO				0.00
7.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	0.00			0.00
7.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO				0.00
7.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja-LO				0.00
7.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO				0.00
7.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO				0.00
7.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD-LO	0			0.00
7.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan-LO	0			0.00
7.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO				0.00
7.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas-LO				0.00
7.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO				0.00
7.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM-LO				0.00
7.2.01.01.04.0018	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata-LO				0.00
7.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal-LO				0.00
7.2.01.01.04.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak				0.00
7.2.01.01.04.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian				0.00
7.2.01.01.04.0024	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM-LO				0.00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMB	0.00			0.00
					0.00
	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				0.00
7.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)-LO	0.00			0.00
7.2.01.02.01	DID-LO	0.00			0.00
7.2.01.02.01.0001	DID-LO				0.00
7.2.01.05	Dana Desa-LO	0			0
7.2.01.05.01	Dana Desa-LO	0			0.00
7.2.01.05.01.0001	Dana Desa-LO	0			0.00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	0.00			0.00
					0.00
7.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	0.00			0.00
7.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil-LO	0.00			0.00
7.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO	0.00			0.00
7.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO				0.00
7.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO				0.00
7.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO				0.00
7.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan-LO				0.00
7.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO				0.00
7.2.02.02	Bantuan Keuangan	0.00			0.00
7.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	0.00			0.00
7.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi				0.00

	JUMLAH Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	0.00			0.00
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER-LO	0.00			0.00
7.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	0.00			0.00
7.3.01	Pendapatan Hibah-LO	0.00			0.00
7.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	0.00			0.00
7.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	0.00			0.00
7.3.01.01.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO				0.00
7.3.01.02	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	0.00			0.00
7.3.01.02.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	0.00			0.00
7.3.01.02.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah-LO				0.00
7.3.01.05	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	0.00			0.00
7.3.01.05.01	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	0.00			0.00
7.3.01.05.01.0001	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO				0.00
7.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	0.00			0.00
7.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	0.00			0.00
7.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	0.00			0.00
7.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Rumah Sakit Non BLUD-LO	0			0.00
7.3.03.02.01.0002	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD-LO				0.00
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	0.00			0.00
	JUMLAH PENDAPATAN	0.00			0.00
8	BEBAN	2,835,900,030.83			2,937,720,418.83
8.1	BEBAN OPERASI	2,835,900,030.83			2,835,561,532.83
8.1.01	Beban Pegawai	2,091,994,627.00			2,091,167,393.00
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1,423,622,262.00			1,420,527,663.00
8.1.01.01.01	Beban Gaji Pokok ASN	1,120,462,745.00			1,117,534,025.00
8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	1,120,462,745.00		2928720	1,117,534,025.00
8.1.01.01.01.0002	Beban Gaji Pokok PPPK				0.00
8.1.01.01.02	Beban Tunjangan Keluarga ASN	128,184,371.00			128,018,642.00
8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	128,184,371.00		165729	128,018,642.00
8.1.01.01.02.0002	Beban Tunjangan Keluarga PPPK				0.00
8.1.01.01.03	Beban Tunjangan Jabatan ASN	78,370,000.00			78,370,000.00
8.1.01.01.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	78,370,000.00			78,370,000.00
8.1.01.01.04	Beban Tunjangan Fungsional ASN	0.00			0.00
8.1.01.01.04.0001	Beban Tunjangan Fungsional PNS				0.00
8.1.01.01.04.0002	Beban Tunjangan Fungsional PPPK				0.00
8.1.01.01.05	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	29,788,000.00			29,788,000.00
8.1.01.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	29,788,000.00			29,788,000.00
8.1.01.01.05.0002	Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK				0.00
8.1.01.01.06	Beban Tunjangan Beras ASN	64,308,960.00			64,308,960.00
8.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	64,308,960.00			64,308,960.00
8.1.01.01.06.0002	Beban Tunjangan Beras PPPK				0.00
8.1.01.01.07	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2,494,993.00			2,494,993.00
8.1.01.01.07.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2,494,993.00			2,494,993.00
8.1.01.01.08	Beban Pembulatan Gaji ASN	13,193.00			13,043.00
8.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	13,193.00		150	13,043.00
8.1.01.01.08.0002	Beban Pembulatan Gaji PPPK				0.00
8.1.01.01.09	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	0.00			0.00
8.1.01.01.09.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS				0.00
8.1.01.01.09.0002	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK				0.00
8.1.01.01.10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	0.00			0.00
8.1.01.01.10.0001	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS				0.00
8.1.01.01.10.0002	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK				0.00
8.1.01.01.11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	0.00			0.00
8.1.01.01.11.0001	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS				0.00
8.1.01.01.11.0002	Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK				0.00
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	665,558,365.00			667,825,730.00
8.1.01.02.01	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	665,558,365.00			667,825,730.00
8.1.01.02.01.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	665,558,365.00	47307110	45039745	667,825,730.00
8.1.01.02.05	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	0			0
8.1.01.02.05.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	0			0.00
8.1.01.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2,814,000.00			2,814,000.00
8.1.01.03.01	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	0.00			0.00
8.1.01.03.01.0004	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan				0.00
8.1.01.03.01.0006	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel				0.00
8.1.01.03.01.0007	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran				0.00
8.1.01.03.01.0009	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame				0.00
8.1.01.03.01.0010	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan				0.00
8.1.01.03.01.0011	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir				0.00
8.1.01.03.01.0012	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah				0.00
8.1.01.03.01.0013	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet				0.00
8.1.01.03.01.0014	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan				0.00
8.1.01.03.01.0015	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan				0.00
8.1.01.03.01.0016	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan				0.00
8.1.01.03.02	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	0.00			0.00
8.1.01.03.02.0001	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan				0.00
8.1.01.03.02.0002	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum -Pelayanan Persampahan/Kebersihan				0.00
8.1.01.03.02.0004	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah Jasa Umum -Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum				0.00
8.1.01.03.02.0005	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah Jasa Umum-Pelayanan Pasar				0.00
8.1.01.03.02.0006	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor				0.00
8.1.01.03.02.0013	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi				0.00
8.1.01.03.02.0014	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha -Pemakaian Kekayaan Daerah				0.00

8.1.01.03.02.0015	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha -Pasar Grosir dan/atau Pertokoan		0.00
8.1.01.03.02.0016	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan		0.00
8.1.01.03.02.0020	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan		0.00
8.1.01.03.02.0022	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga		0.00
8.1.01.03.02.0024	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah		0.00
8.1.01.03.02.0026	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol		0.00
8.1.01.03.02.0031	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung		0.00
8.1.01.03.03	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	0.00	0.00
8.1.01.03.03.0001	Beban TPG PNSD		0.00
8.1.01.03.05	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	0.00	0.00
8.1.01.03.05.0001	Beban Tamsil Guru PNSD		0.00
8.1.01.03.06	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0.00	0.00
8.1.01.03.06.0001	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN		0.00
8.1.01.03.07	Beban Honorarium	2,814,000.00	2,814,000.00
8.1.01.03.07.0001	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2,814,000.00	2,814,000.00
8.1.01.03.07.0002	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		0.00
8.1.01.03.07.0003	Beban Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPB)		0.00
8.1.01.03.08	Beban Jasa Pengelolaan BMD	0.00	0.00
8.1.01.03.08.0002	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan		0.00
8.1.01.04	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	0.00	0.00
8.1.01.04.01	Beban Uang Representasi DPRD	0.00	0.00
8.1.01.04.01.0001	Beban Uang Representasi DPRD		0.00
8.1.01.04.02	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	0.00	0.00
8.1.01.04.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga DPRD		0.00
8.1.01.04.03	Beban Tunjangan Beras DPRD	0.00	0.00
8.1.01.04.03.0001	Beban Tunjangan Beras DPRD		0.00
8.1.01.04.04	Beban Uang Paket DPRD	0.00	0.00
8.1.01.04.04.0001	Beban Uang Paket DPRD		0.00
8.1.01.04.05	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	0.00	0.00
8.1.01.04.05.0001	Beban Tunjangan Jabatan DPRD		0.00
8.1.01.04.07	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	0.00	0.00
8.1.01.04.07.0001	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD		0.00
8.1.01.04.08	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	0.00	0.00
8.1.01.04.08.0001	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD		0.00
8.1.01.04.09	Beban Tunjangan Reses DPRD	0.00	0.00
8.1.01.04.09.0001	Beban Tunjangan Reses DPRD		0.00
8.1.01.04.10	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	0.00	0.00
8.1.01.04.10.0001	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD		0.00
8.1.01.04.12	Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	0.00	0.00
8.1.01.04.12.0001	Beban Jaminan Kesehatan DPRD		0.00
8.1.01.04.12.0002	Beban Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD		0.00
8.1.01.04.12.0003	Beban Jaminan Kematian DPRD		0.00
8.1.01.04.12.0004	Beban Tunjangan Perumahan DPRD		0.00
8.1.01.04.13	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	0.00	0.00
8.1.01.04.13.0001	Beban Tunjangan Transportasi DPRD		0.00
8.1.01.04.14	Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	0.00	0.00
8.1.01.04.14.0001	Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD		0.00
8.1.01.05	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	0.00	0.00
8.1.01.05.01	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	0.00	0.00
8.1.01.05.01.0001	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH		0.00
8.1.01.05.02	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	0.00	0.00
8.1.01.05.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH		0.00
8.1.01.05.03	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	0.00	0.00
8.1.01.05.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH		0.00
8.1.01.05.04	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	0.00	0.00
8.1.01.05.04.0001	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH		0.00
8.1.01.05.05	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	0.00	0.00
8.1.01.05.05.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH		0.00
8.1.01.05.06	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	0	0
8.1.01.05.06.0001	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH		0.00
8.1.01.06	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	0.00	0.00
8.1.01.06.01	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	0.00	0.00
8.1.01.06.01.0001	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD		0.00
8.1.01.06.02	Beban Dana Operasional KDH/WKDH	0.00	0.00
8.1.01.06.02.0001	Beban Dana Operasional KDH/WKDH		0.00
8.1.01.88	Beban Pegawai BOS	0.00	0.00
8.1.01.88.88	Beban Pegawai BOS	0.00	0.00
8.1.01.88.88.8888	Beban Pegawai BOS		0.00
8.1.01.99	Beban Pegawai BLUD	0.00	0.00
8.1.01.99.99	Beban Pegawai BLUD	0.00	0.00
8.1.01.99.99.9999	Beban Pegawai BLUD		0.00
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	743,905,403.83	744,394,139.83
8.1.02.01	Beban Barang	384,710,523.00	384,777,959.00
8.1.02.01.01	Beban Barang Pakai Habis	384,710,523.00	384,777,959.00
8.1.02.01.01.0001	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi		0.00
8.1.02.01.01.0002	Beban Bahan-Bahan Kimia		0.00
8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	57,384,600.00	57,384,600.00
8.1.02.01.01.0005	Beban Bahan-Bahan Baku		0.00
8.1.02.01.01.0008	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman		0.00
8.1.02.01.01.0010	Beban Bahan-Isi Tabung Gas		0.00
8.1.02.01.01.0011	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan		0.00
8.1.02.01.01.0012	Beban Bahan-Bahan Lainnya	1,971,896.00	1,971,896.00
8.1.02.01.01.0013	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan		0.00
8.1.02.01.01.0014	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar		0.00

8.1.02.01.01.0015	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran				0.00
8.1.02.01.01.0016	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium				0.00
8.1.02.01.01.0019	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian				0.00
8.1.02.01.01.0020	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel				0.00
8.1.02.01.01.0023	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya				0.00
8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	16,965,245.00	591436	226000	17,330,681.00
8.1.02.01.01.0025	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	168,000.00			168,000.00
8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3,163,200.00			3,163,200.00
8.1.02.01.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos				0.00
8.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1,112,000.00		298000	814,000.00
8.1.02.01.01.0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2,373,194.00			2,373,194.00
8.1.02.01.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4,271,500.00			4,271,500.00
8.1.02.01.01.0032	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas				0.00
8.1.02.01.01.0034	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga				0.00
8.1.02.01.01.0035	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata				0.00
8.1.02.01.01.0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya				0.00
8.1.02.01.01.0037	Beban Obat-Obatan-Obat				0.00
8.1.02.01.01.0038	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya				0.00
8.1.02.01.01.0039	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	60,526,600.00			60,526,600.00
8.1.02.01.01.0043	Beban Natura dan Pakan-Natura				0.00
8.1.02.01.01.0044	Beban Natura dan Pakan-Pakan				0.00
8.1.02.01.01.0045	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya				0.00
8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	225,975,000.00			225,975,000.00
8.1.02.01.01.0053	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu				0.00
8.1.02.01.01.0054	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh				0.00
8.1.02.01.01.0056	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan				0.00
8.1.02.01.01.0059	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH				0.00
8.1.02.01.01.0060	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD				0.00
8.1.02.01.01.0064	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)				0.00
8.1.02.01.01.0068	Beban Pakaian Siaga				0.00
8.1.02.01.01.0074	Beban Pakaian Adat Daerah				0.00
8.1.02.01.01.0075	Beban Pakaian Batik Tradisional				0.00
8.1.02.01.01.0076	Beban Pakaian Olahraga				0.00
8.1.02.01.01.0077	Beban Pakaian Paskibraka	10,799,288.00			10,799,288.00
8.1.02.01.04	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	0.00			0.00
8.1.02.01.04.0039	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga				0.00
8.1.02.02	Beban Jasa	161,694,263.00			162,115,563.00
8.1.02.02.01	Beban Jasa Kantor	104,583,456.00			105,004,756.00
8.1.02.02.01.0001	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	1,200,000.00			1,200,000.00
8.1.02.02.01.0002	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan				0.00
8.1.02.02.01.0003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				0.00
8.1.02.02.01.0004	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana	12,000,000.00			12,000,000.00
8.1.02.02.01.0005	Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara				0.00
8.1.02.02.01.0006	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan				0.00
8.1.02.02.01.0007	Beban Honorarium Rohaniwan				0.00
8.1.02.02.01.0009	Beban Honorarium Penyelenggara Ujian				0.00
8.1.02.02.01.0011	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan				0.00
8.1.02.02.01.0012	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah				0.00
8.1.02.02.01.0013	Beban Jasa Tenaga Pendidikan				0.00
8.1.02.02.01.0014	Beban Jasa Tenaga Kesehatan				0.00
8.1.02.02.01.0015	Beban Jasa Tenaga Laboratorium				0.00
8.1.02.02.01.0017	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat				0.00
8.1.02.02.01.0025	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan				0.00
8.1.02.02.01.0026	Beban Jasa Tenaga Administrasi				0.00
8.1.02.02.01.0028	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	60,250,000.00			60,250,000.00
8.1.02.02.01.0029	Beban Jasa Tenaga Ahli				0.00
8.1.02.02.01.0030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan				0.00
8.1.02.02.01.0031	Beban Jasa Tenaga Keamanan				0.00
8.1.02.02.01.0033	Beban Jasa Tenaga Supir				0.00
8.1.02.02.01.0035	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik				0.00
8.1.02.02.01.0036	Beban Jasa Audit/Surveillance ISO				0.00
8.1.02.02.01.0037	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	10,800,000.00			10,800,000.00
8.1.02.02.01.0038	Beban Jasa Tata Rias				0.00
8.1.02.02.01.0039	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi				0.00
8.1.02.02.01.0042	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan				0.00
8.1.02.02.01.0046	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi				0.00
8.1.02.02.01.0047	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara				0.00
8.1.02.02.01.0048	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi				0.00
8.1.02.02.01.0050	Beban Jasa Kalibrasi				0.00
8.1.02.02.01.0051	Beban Jasa Pengolahan Sampah				0.00
8.1.02.02.01.0052	Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi				0.00
8.1.02.02.01.0055	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan				0.00
8.1.02.02.01.0059	Beban Tagihan Telepon				0.00
8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air				0.00
8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik	7,117,675.00			7,117,675.00
8.1.02.02.01.0062	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah				0.00
8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	10,365,000.00	890000	468700	10,786,300.00
8.1.02.02.01.0064	Beban Paket/Pengiriman				0.00
8.1.02.02.01.0065	Beban Penambahan Daya				0.00
8.1.02.02.01.0067	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2,850,781.00			2,850,781.00
8.1.02.02.01.0069	Beban Pengolahan Air Limbah				0.00
8.1.02.02.01.0073	Beban Medical Check Up				0.00
8.1.02.02.01.0077	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN				0.00
8.1.02.02.02	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	432,000.00			432,000.00

8.1.02.02.02.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa			0.00
8.1.02.02.02.0002	Beban Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI			0.00
8.1.02.02.02.0003	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3			0.00
8.1.02.02.02.0004	Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3			0.00
8.1.02.02.02.0005	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN			0.00
8.1.02.02.02.0006	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	191,999.00		191,999.00
8.1.02.02.02.0007	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	240,001.00		240,001.00
8.1.02.02.03	Beban Sewa Tanah	0.00		0.00
8.1.02.02.03.0001	Beban Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal			0.00
8.1.02.02.03.0030	Beban Sewa Tanah untuk Latihan			0.00
8.1.02.02.04	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	52,178,807.00		52,178,807.00
8.1.02.02.04.0003	Beban Sewa Excavator			0.00
8.1.02.02.04.0036	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang			0.00
8.1.02.02.04.0090	Beban Sewa Alat Ukur Lain-Lain			0.00
8.1.02.02.04.0112	Beban Sewa Alat Pengolahan Lainnya			0.00
8.1.02.02.04.0123	Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	52,178,807.00		52,178,807.00
8.1.02.02.04.0132	Beban Sewa Peralatan Studio Audio			0.00
8.1.02.02.04.0411	Beban Sewa Peralatan Komputer Lainnya			0.00
8.1.02.02.05	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	0.00		0.00
8.1.02.02.05.0001	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor			0.00
8.1.02.02.05.0009	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan			0.00
8.1.02.02.05.0043	Beban Sewa Hotel			0.00
8.1.02.02.05.0050	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya			0.00
8.1.02.02.07	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	0.00		0.00
8.1.02.02.07.0031	Beban Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya			0.00
8.1.02.02.09	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	0.00		0.00
8.1.02.02.09.0002	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural			0.00
8.1.02.02.09.0018	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur			0.00
8.1.02.02.10	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	0.00		0.00
8.1.02.02.10.0012	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik			0.00
8.1.02.02.12	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	0.00		0.00
8.1.02.02.12.0002	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2			0.00
8.1.02.02.13	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan	4,500,000.00		4,500,000.00
8.1.02.02.13.0001	Beban Kursus Singkat/Pelatihan			0.00
8.1.02.02.13.0002	Beban Sosialisasi			0.00
8.1.02.02.13.0003	Beban Bimbingan Teknis	4,500,000.00		4,500,000.00
8.1.02.02.13.0004	Beban Diklat Kepemimpinan			0.00
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	77,507,809.83		77,507,809.83
8.1.02.03.02	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6,420,000.00		6,420,000.00
8.1.02.03.02.0012	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya			0.00
8.1.02.03.02.0035	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan			0.00
8.1.02.03.02.0036	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kenda	3,500,000.00		3,500,000.00
8.1.02.03.02.0038	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua			0.00
8.1.02.03.02.0096	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor			0.00
8.1.02.03.02.0117	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya			0.00
8.1.02.03.02.0121	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin			0.00
8.1.02.03.02.0123	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-	2,920,000.00		2,920,000.00
8.1.02.03.02.0204	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum			0.00
8.1.02.03.02.0404	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan			0.00
8.1.02.03.02.0405	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer			0.00
8.1.02.03.02.0409	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer			0.00
8.1.02.03.02.0411	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya			0.00
8.1.02.03.02.0492	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar			0.00
8.1.02.03.03	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	71,087,809.83		71,087,809.83
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-	71,087,809.83		71,087,809.83
8.1.02.03.03.0036	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman			0.00
8.1.02.03.04	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0.00		0.00
8.1.02.03.04.0002	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi			0.00
8.1.02.03.04.0026	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi			0.00
8.1.02.03.04.0083	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya			0.00
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	76,492,808.00		76,492,808.00
8.1.02.04.01	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	76,492,808.00		76,492,808.00
8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	16,972,808.00		16,972,808.00
8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	59,520,000.00		59,520,000.00
8.1.02.05	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak	43,500,000.00		43,500,000.00
8.1.02.05.01	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	43,500,000.00		43,500,000.00
8.1.02.05.01.0001	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	43,500,000.00		43,500,000.00
8.1.02.05.01.0005	Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)			0.00
8.1.02.05.01.0006	Beban Bantuan Fasilitas Premi Asuransi Pertanian			0.00
8.1.02.05.01.0012	Beban Uang yang Diberikan kepada Posyandu			0.00
8.1.02.05.02	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0.00		0.00
8.1.02.05.02.0001	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain			0.00
8.1.02.88	Beban Barang dan Jasa BOS	0.00		0.00
8.1.02.88.88	Beban Barang dan Jasa BOS	0.00		0.00
8.1.02.88.88.8888	Beban Barang dan Jasa BOS			0.00
8.1.02.89	Beban Barang dan Jasa BOSP	0		0
8.1.02.89.01	Beban Barang dan Jasa BOSP-BOS	0		0
8.1.02.89.01.0001	Beban Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	0		0.00
8.1.02.99	Beban Barang dan Jasa BLUD	0		0
8.1.02.99.99	Beban Barang dan Jasa BLUD	0		0
8.1.02.99.99.9999	Beban Barang dan Jasa BLUD	0		0.00
8.1.03	Beban Bunga	0.00		0.00
8.1.03.01	Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat	0.00		0.00

8.1.03.01.02	Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang	0.00		0.00
8.1.03.01.02.0001	Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang			0.00
8.1.05	Beban Hibah	0.00		0.00
8.1.05.01	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	0.00		0.00
8.1.05.01.01	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	0.00		0.00
8.1.05.01.01.0001	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat			0.00
8.1.05.01.02	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	0.00		0.00
8.1.05.01.02.0001	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat			0.00
8.1.05.05	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan	0.00		0.00
8.1.05.05.01	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan	0.00		0.00
8.1.05.05.01.0001	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan			0.00
8.1.05.05.02	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0.00		0.00
8.1.05.05.02.0001	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar			0.00
8.1.05.05.03	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0.00		0.00
8.1.05.05.03.0001	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan			0.00
8.1.05.05.03.0002	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan			0.00
8.1.05.07	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	0.00		0.00
8.1.05.07.01	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	0.00		0.00
8.1.05.07.01.0001	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik			0.00
8.1.05.08	Beban Hibah Dana BOSP	0		0
8.1.05.08.01	Beban Hibah Dana BOSP-BOS	0		0
8.1.05.08.01.0001	Beban Hibah Dana BOSP-BOS	0		0.00
8.1.05.08.02	Beban Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	0		0
8.1.05.08.02.0001	Beban Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	0		0.00
8.1.05.08.03	Beban Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	0		0
8.1.05.08.03.0001	Beban Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	0		0.00
8.1.06	Beban Bantuan Sosial	0.00		0.00
8.1.06.01	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	0.00		0.00
8.1.06.01.01	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	0.00		0.00
8.1.06.01.01.0001	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu			0.00
8.1.07	Beban Penyisihan Piutang	0.00		0.00
8.1.07.01	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	0.00		0.00
8.1.07.01.15	Beban Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	0.00		0.00
8.1.07.01.15.0001	Beban Penyisihan Piutang PBBP2			0.00
8.1.07.02	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	0.00		0.00
8.1.07.02.01	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum	0.00		0.00
8.1.07.02.01.0006	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis			0.00
8.1.07.02.01.0032	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi			0.00
8.1.07.02.02	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha	0.00		0.00
8.1.07.02.02.0001	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan			0.00
8.1.07.02.02.0002	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah			0.00
8.1.07.02.02.0009	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan			0.00
	JUMLAH BEBAN OPERASI	2,835,900,030.83		2,835,561,532.83
				0.00
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	0.00		102,158,886.00
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0.00		80,653,559.00
8.1.08.01.01	Beban Penyusutan Alat Besar	0.00		0.00
8.1.08.01.01.0001	Beban Penyusutan Alat Besar Darat-Tractor			0.00
8.1.08.01.01.0003	Beban Penyusutan Alat Besar Darat-Excavator			0.00
8.1.08.01.01.0005	Beban Penyusutan Alat Besar Darat-Hauler			0.00
8.1.08.01.01.0006	Beban Penyusutan Alat Besar Darat-Asphalt Equipment			0.00
8.1.08.01.01.0007	Beban Penyusutan Alat Besar Darat-Compacting Equipment			0.00
8.1.08.01.01.0008	Beban Penyusutan Alat Besar Darat-Aggregate and Concrete Equipment			0.00
8.1.08.01.01.0010	Beban Penyusutan Alat Besar Darat-Alat Pengangkat			0.00
8.1.08.01.01.0011	Beban Penyusutan Alat Besar Darat-Mesin Proses			0.00
8.1.08.01.01.0012	Beban Penyusutan Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya			0.00
8.1.08.01.01.0013	Beban Penyusutan Alat Besar Apung-Dredger			0.00
8.1.08.01.01.0019	Beban Penyusutan Alat Bantu-Alat Penarik			0.00
8.1.08.01.01.0022	Beban Penyusutan Alat Bantu-Electric Generating Set			0.00
8.1.08.01.01.0023	Beban Penyusutan Alat Bantu-Pompa			0.00
8.1.08.01.01.0024	Beban Penyusutan Alat Bantu-Mesin Bor			0.00
8.1.08.01.01.0025	Beban Penyusutan Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan			0.00
8.1.08.01.01.0028	Beban Penyusutan Alat Bantu-Air Port Maintenance Equipment/Alat Bantu Penerbangan			0.00
8.1.08.01.01.0030	Beban Penyusutan Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan			0.00
8.1.08.01.01.0032	Beban Penyusutan Alat Bantu-Peralatan SAR Mountenering			0.00
8.1.08.01.01.0033	Beban Penyusutan Alat Bantu-Peralatan Intelijen			0.00
8.1.08.01.01.0034	Beban Penyusutan Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya			0.00
8.1.08.01.02	Beban Penyusutan Alat Angkutan	0.00		32,025,977.00
8.1.08.01.02.0001	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan			0.00
8.1.08.01.02.0002	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang		31200977	31,200,977.00
8.1.08.01.02.0003	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang			0.00

8.1.08.01.02.0004	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua		825000		825,000.00
8.1.08.01.02.0005	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga				0.00
8.1.08.01.02.0006	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus				0.00
8.1.08.01.02.0008	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel				0.00
8.1.08.01.02.0009	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya				0.00
8.1.08.01.02.0010	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang				0.00
8.1.08.01.02.0011	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang				0.00
8.1.08.01.02.0012	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor				0.00
8.1.08.01.02.0013	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya				0.00
8.1.08.01.02.0014	Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang				0.00
8.1.08.01.02.0015	Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang				0.00
8.1.08.01.02.0016	Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus				0.00
8.1.08.01.03	Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur		0.00		0.00
8.1.08.01.03.0001	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi				0.00
8.1.08.01.03.0002	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)				0.00
8.1.08.01.03.0003	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik				0.00
8.1.08.01.03.0004	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Service				0.00
8.1.08.01.03.0006	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu				0.00
8.1.08.01.03.0007	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus				0.00
8.1.08.01.03.0008	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Peralatan Las				0.00
8.1.08.01.03.0009	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es				0.00
8.1.08.01.03.0011	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam				0.00
8.1.08.01.03.0015	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standar (Standard Tools)				0.00
8.1.08.01.03.0016	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Khusus (Special Tools)				0.00
8.1.08.01.03.0017	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja				0.00
8.1.08.01.03.0018	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Besi				0.00
8.1.08.01.03.0020	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu				0.00
8.1.08.01.03.0021	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Ukur, Gip, dan Feeting				0.00
8.1.08.01.03.0022	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Bengkel Khusus Peladam				0.00
8.1.08.01.03.0024	Beban Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Universal				0.00
8.1.08.01.03.0027	Beban Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Klinis Lain				0.00
8.1.08.01.03.0028	Beban Penyusutan Alat Ukur-Alat Kalibrasi				0.00
8.1.08.01.03.0030	Beban Penyusutan Alat Ukur-Universal Tester				0.00
8.1.08.01.03.0031	Beban Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding				0.00
8.1.08.01.03.0032	Beban Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain				0.00
8.1.08.01.03.0033	Beban Penyusutan Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara				0.00
8.1.08.01.03.0034	Beban Penyusutan Alat Ukur-Anak Timbangan/Biara				0.00
8.1.08.01.03.0040	Beban Penyusutan Alat Ukur-Alat Pengukur Keadaan Alam				0.00
8.1.08.01.03.0041	Beban Penyusutan Alat Ukur-Alat Pengukur Penglihatan				0.00
8.1.08.01.03.0044	Beban Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya				0.00
8.1.08.01.04	Beban Penyusutan Alat Pertanian		0.00		0.00
8.1.08.01.04.0001	Beban Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman				0.00
8.1.08.01.04.0002	Beban Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak				0.00
8.1.08.01.04.0003	Beban Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Panen				0.00
8.1.08.01.04.0004	Beban Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian				0.00
8.1.08.01.04.0005	Beban Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian				0.00
8.1.08.01.04.0006	Beban Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Processing				0.00
8.1.08.01.04.0008	Beban Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan				0.00
8.1.08.01.04.0009	Beban Penyusutan Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan				0.00
8.1.08.01.04.0010	Beban Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya				0.00
8.1.08.01.05	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga		0.00		23,166,050.00
8.1.08.01.05.0001	Beban Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik				0.00
8.1.08.01.05.0002	Beban Penyusutan Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah				0.00
8.1.08.01.05.0003	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)				0.00
8.1.08.01.05.0004	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor		2383050		2,383,050.00
8.1.08.01.05.0005	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya		1782183		1,782,183.00
8.1.08.01.05.0006	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel		12457485		12,457,485.00
8.1.08.01.05.0007	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu				0.00
8.1.08.01.05.0008	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih				0.00
8.1.08.01.05.0009	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin		863332		863,332.00
8.1.08.01.05.0010	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur				0.00
8.1.08.01.05.0011	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		4974067		4,974,067.00
8.1.08.01.05.0012	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran				0.00
8.1.08.01.05.0013	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat		320000		320,000.00
8.1.08.01.05.0014	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat				0.00
8.1.08.01.05.0015	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat				0.00
8.1.08.01.05.0016	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat				0.00
8.1.08.01.05.0017	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat				0.00
8.1.08.01.05.0018	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangannya				0.00
8.1.08.01.05.0019	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat		385933		385,933.00

8.1.08.01.06	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0.00		1,350,000.00
8.1.08.01.06.0001	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio			0.00
8.1.08.01.06.0002	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film		750000	750,000.00
8.1.08.01.06.0003	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Gambar			0.00
8.1.08.01.06.0004	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Cetak			0.00
8.1.08.01.06.0005	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah			0.00
8.1.08.01.06.0006	Beban Penyusutan Alat Studio-Alat Studio Lainnya			0.00
8.1.08.01.06.0007	Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone		600000	600,000.00
8.1.08.01.06.0011	Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF			0.00
8.1.08.01.06.0012	Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial			0.00
8.1.08.01.06.0013	Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat-Alat Sandi			0.00
8.1.08.01.06.0015	Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional			0.00
8.1.08.01.06.0016	Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Satelit			0.00
8.1.08.01.06.0017	Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya			0.00
8.1.08.01.06.0023	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena MF/MW			0.00
8.1.08.01.06.0027	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola			0.00
8.1.08.01.06.0036	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Switcher Antena			0.00
8.1.08.01.06.0037	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Switcher/Menara Antena			0.00
8.1.08.01.06.0038	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Feeder			0.00
8.1.08.01.06.0040	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Program Input Equipment			0.00
8.1.08.01.06.0051	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima UHF			0.00
8.1.08.01.06.0062	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan			0.00
8.1.08.01.06.0063	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio			0.00
8.1.08.01.06.0064	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga			0.00
8.1.08.01.07	Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	0.00		0.00
8.1.08.01.07.0001	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum			0.00
8.1.08.01.07.0002	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi			0.00
8.1.08.01.07.0003	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana			0.00
8.1.08.01.07.0004	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah			0.00
8.1.08.01.07.0005	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan			0.00
8.1.08.01.07.0006	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran THT			0.00
8.1.08.01.07.0007	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata			0.00
8.1.08.01.07.0008	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam			0.00
8.1.08.01.07.0010	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak			0.00
8.1.08.01.07.0011	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik			0.00
8.1.08.01.07.0012	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis			0.00
8.1.08.01.07.0013	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)			0.00
8.1.08.01.07.0014	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung			0.00
8.1.08.01.07.0015	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radiodiagnostic			0.00
8.1.08.01.07.0016	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Patologi Anatomi			0.00
8.1.08.01.07.0017	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Transfusi Darah			0.00
8.1.08.01.07.0018	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radioterapi			0.00
8.1.08.01.07.0019	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Nuklir			0.00
8.1.08.01.07.0020	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin			0.00
8.1.08.01.07.0021	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat			0.00
8.1.08.01.07.0023	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Ortopedi			0.00
8.1.08.01.07.0024	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICU			0.00
8.1.08.01.07.0025	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICCU			0.00
8.1.08.01.07.0026	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Jantung			0.00
8.1.08.01.07.0028	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anestesi			0.00
8.1.08.01.07.0029	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya			0.00
8.1.08.01.07.0030	Beban Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Laut			0.00
8.1.08.01.07.0032	Beban Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Kepolisian			0.00
8.1.08.01.07.0033	Beban Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Olahraga			0.00
8.1.08.01.07.0034	Beban Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya			0.00
8.1.08.01.08	Beban Penyusutan Alat Laboratorium	0.00		0.00
8.1.08.01.08.0001	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan			0.00
8.1.08.01.08.0002	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi Teknik Penyehatan			0.00
8.1.08.01.08.0003	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrokimia			0.00
8.1.08.01.08.0006	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi			0.00
8.1.08.01.08.0007	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia			0.00
8.1.08.01.08.0008	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan			0.00
8.1.08.01.08.0010	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik			0.00
8.1.08.01.08.0011	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum			0.00
8.1.08.01.08.0012	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi			0.00
8.1.08.01.08.0013	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia			0.00
8.1.08.01.08.0014	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi			0.00
8.1.08.01.08.0015	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Immunologi			0.00
8.1.08.01.08.0016	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi			0.00
8.1.08.01.08.0017	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film			0.00
8.1.08.01.08.0018	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan			0.00
8.1.08.01.08.0019	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi			0.00
8.1.08.01.08.0020	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika			0.00
8.1.08.01.08.0026	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pembuatan Pola			0.00
8.1.08.01.08.0027	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metalografi			0.00
8.1.08.01.08.0033	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas			0.00
8.1.08.01.08.0034	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil			0.00
8.1.08.01.08.0035	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Tekstil			0.00
8.1.08.01.08.0037	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik			0.00
8.1.08.01.08.0038	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik			0.00
8.1.08.01.08.0039	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Keramik			0.00
8.1.08.01.08.0040	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa			0.00
8.1.08.01.08.0041	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian			0.00
8.1.08.01.08.0044	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas			0.00

8.1.08.01.08.0045	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Oseanografi			0.00
8.1.08.01.08.0046	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan			0.00
8.1.08.01.08.0047	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi Perairan			0.00
8.1.08.01.08.0048	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi			0.00
8.1.08.01.08.0049	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika			0.00
8.1.08.01.08.0050	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Tambang			0.00
8.1.08.01.08.0051	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia			0.00
8.1.08.01.08.0052	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Industri			0.00
8.1.08.01.08.0054	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Kearsipan			0.00
8.1.08.01.08.0055	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Hematologi dan Urinalisis			0.00
8.1.08.01.08.0056	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain			0.00
8.1.08.01.08.0061	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi			0.00
8.1.08.01.08.0064	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya			0.00
8.1.08.01.08.0065	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Nuklir-Analytical Instrument			0.00
8.1.08.01.08.0067	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Nuklir-General Laboratory Tool			0.00
8.1.08.01.08.0068	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Nuklir-Glassware Plastic/Utensils			0.00
8.1.08.01.08.0069	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Nuklir-Laboratory Safety Equipment			0.00
8.1.08.01.08.0071	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia			0.00
8.1.08.01.08.0072	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika			0.00
8.1.08.01.08.0073	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar			0.00
8.1.08.01.08.0074	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan			0.00
8.1.08.01.08.0075	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah			0.00
8.1.08.01.08.0076	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas			0.00
8.1.08.01.08.0077	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS			0.00
8.1.08.01.08.0078	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama			0.00
8.1.08.01.08.0079	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan			0.00
8.1.08.01.08.0080	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian			0.00
8.1.08.01.08.0081	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga			0.00
8.1.08.01.08.0082	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN			0.00
8.1.08.01.08.0085	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK			0.00
8.1.08.01.08.0086	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya			0.00
8.1.08.01.08.0088	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Modular Counting And Scientific Electronic			0.00
8.1.08.01.08.0089	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Assembly/Counting System			0.00
8.1.08.01.08.0090	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Recorder Display			0.00
8.1.08.01.08.0091	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-System/Power Supply			0.00
8.1.08.01.08.0092	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Measuring/Testing Device			0.00
8.1.08.01.08.0096	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya			0.00
8.1.08.01.08.0097	Beban Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Ukur Fisika Kesehatan			0.00
8.1.08.01.08.0098	Beban Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja			0.00
8.1.08.01.08.0099	Beban Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Proteksi Lingkungan			0.00
8.1.08.01.08.0100	Beban Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Meteorological Equipment			0.00
8.1.08.01.08.0108	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara			0.00
8.1.08.01.08.0110	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan			0.00
8.1.08.01.08.0111	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang			0.00
8.1.08.01.08.0115	Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Data Acquisition and Analyzing System			0.00
8.1.08.01.08.0117	Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Overhead Cranes			0.00
8.1.08.01.08.0118	Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Peralatan Umum			0.00
8.1.08.01.08.0119	Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Pemesinan:Model Ship Workshop			0.00
8.1.08.01.08.0126	Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-MOB			0.00
8.1.08.01.08.0130	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator			0.00
8.1.08.01.08.0131	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Cahaya, Optik dan Akustik			0.00
8.1.08.01.08.0132	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik			0.00
8.1.08.01.08.0137	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran			0.00
8.1.08.01.09	Beban Penyusutan	0.00		0.00
8.1.08.01.09.0010	Beban Penyusutan Senjata Api-Senjata Lain-Lain			0.00
8.1.08.01.09.0011	Beban Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api-Alat Keamanan			0.00
8.1.08.01.09.0012	Beban Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api-Non Senjata Api			0.00
8.1.08.01.09.0013	Beban Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api-Alat Penjinak Bahan Peledak (Aljihandak)			0.00
8.1.08.01.09.0014	Beban Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api-Alat Nuklir, Biologi Dan Kimia			0.00
8.1.08.01.09.0019	Beban Penyusutan Alat Khusus Kepolisian-Alat Dalmas/Alat Dakhura			0.00
8.1.08.01.09.0020	Beban Penyusutan Alat Khusus Kepolisian-Alat Wanteror (Perlawanan Teror)			0.00
8.1.08.01.09.0022	Beban Penyusutan Alat Khusus Kepolisian-Alsus Lantas			0.00
8.1.08.01.09.0023	Beban Penyusutan Alat Khusus Kepolisian-Alsus Reserse			0.00
8.1.08.01.09.0024	Beban Penyusutan Alat Khusus Kepolisian-Alsus Fotografi Kepolisian			0.00
8.1.08.01.09.0025	Beban Penyusutan Alat Khusus Kepolisian-Alsus Daktiloskopi			0.00
8.1.08.01.09.0026	Beban Penyusutan Alat Khusus Kepolisian-Instrumen Analisis Laboratorium Forensik			0.00
8.1.08.01.10	Beban Penyusutan Komputer	0.00		24,111,532.00
8.1.08.01.10.0001	Beban Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan			0.00
8.1.08.01.10.0002	Beban Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	17046750		17,046,750.00
8.1.08.01.10.0003	Beban Penyusutan Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya			0.00
8.1.08.01.10.0004	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe			0.00
8.1.08.01.10.0005	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer			0.00
8.1.08.01.10.0006	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	7064782		7,064,782.00
8.1.08.01.10.0007	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan			0.00
8.1.08.01.10.0008	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya			0.00
8.1.08.01.13	Beban Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	0.00		0.00
8.1.08.01.13.0002	Beban Penyusutan Sumur-Sumur Pemboran			0.00
8.1.08.01.15	Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	0.00		0.00
8.1.08.01.15.0004	Beban Penyusutan Alat Pelindung-Baju Pengaman			0.00
8.1.08.01.15.0010	Beban Penyusutan Alat SAR-Alat Penolong			0.00
8.1.08.01.15.0011	Beban Penyusutan Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian			0.00
8.1.08.01.15.0012	Beban Penyusutan Alat SAR-Alat Kerja Bawah Air			0.00
8.1.08.01.15.0019	Beban Penyusutan Alat Kerja Penerbangan-Alat Ukur Peralatan Faselistrik			0.00
8.1.08.01.17	Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	0.00		0.00

8.1.08.01.17.0019	Beban Penyusutan Unit Peralatan Proses/Produksi-Transport and Storage Equipment For Liquid			0.00
8.1.08.01.18	Beban Penyusutan Rambu-Rambu	0.00		0.00
8.1.08.01.18.0001	Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar			0.00
8.1.08.01.18.0002	Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar			0.00
8.1.08.01.18.0003	Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya			0.00
8.1.08.01.19	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	0.00		0.00
8.1.08.01.19.0001	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik			0.00
8.1.08.01.19.0002	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan			0.00
8.1.08.01.19.0003	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Senam			0.00
8.1.08.01.19.0004	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Air			0.00
8.1.08.01.19.0006	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya			0.00
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0.00		21,150,639.00
8.1.08.02.01	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	0.00		19,501,059.00
8.1.08.02.01.0001	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	16759019		16,759,019.00
8.1.08.02.01.0002	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang			0.00
8.1.08.02.01.0003	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Untuk Bengkel/Hanggar			0.00
8.1.08.02.01.0004	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi			0.00
8.1.08.02.01.0005	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium			0.00
8.1.08.02.01.0006	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan			0.00
8.1.08.02.01.0007	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Oseanarium/Observatorium			0.00
8.1.08.02.01.0008	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah			0.00
8.1.08.02.01.0009	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan			0.00
8.1.08.02.01.0010	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan			0.00
8.1.08.02.01.0011	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga			0.00
8.1.08.02.01.0012	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar			0.00
8.1.08.02.01.0013	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga			0.00
8.1.08.02.01.0014	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool			0.00
8.1.08.02.01.0015	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pemotongan Hewan			0.00
8.1.08.02.01.0016	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan			0.00
8.1.08.02.01.0018	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara			0.00
8.1.08.02.01.0019	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelainan			0.00
8.1.08.02.01.0025	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka			0.00
8.1.08.02.01.0028	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri			0.00
8.1.08.02.01.0029	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/ Perikanan			0.00
8.1.08.02.01.0030	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya			0.00
8.1.08.02.01.0032	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum			0.00
8.1.08.02.01.0033	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir			0.00
8.1.08.02.01.0036	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman			0.00
8.1.08.02.01.0038	Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I			0.00
8.1.08.02.01.0039	Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II			0.00
8.1.08.02.01.0040	Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	2742040		2,742,040.00
8.1.08.02.01.0041	Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/ Tempat Peristirahatan			0.00
8.1.08.02.01.0042	Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal-Asrama			0.00
8.1.08.02.01.0045	Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun			0.00
8.1.08.02.01.0049	Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal-Rumah Tidak Bersusun			0.00
8.1.08.02.02	Beban Penyusutan Monumen	0.00		0.00
8.1.08.02.02.0002	Beban Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti-Tugu			0.00
8.1.08.02.02.0003	Beban Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti-Bangunan Peninggalan			0.00
8.1.08.02.02.0004	Beban Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti Lainnya			0.00
8.1.08.02.03	Beban Penyusutan Bangunan Menara	0.00		0.00
8.1.08.02.03.0003	Beban Penyusutan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi			0.00
8.1.08.02.04	Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	0.00		1,649,580.00
8.1.08.02.04.0001	Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi			0.00
8.1.08.02.04.0003	Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya			0.00
8.1.08.02.04.0004	Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas-Pagar	1649580		1,649,580.00
8.1.08.02.04.0005	Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya			0.00
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0.00		354,688.00
8.1.08.03.01	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	0.00		0.00
8.1.08.03.01.0001	Beban Penyusutan Jalan-Jalan Nasional			0.00
8.1.08.03.01.0003	Beban Penyusutan Jalan-Jalan Kabupaten			0.00
8.1.08.03.01.0005	Beban Penyusutan Jalan-Jalan Desa			0.00
8.1.08.03.01.0009	Beban Penyusutan Jalan-Jalan Khusus			0.00
8.1.08.03.01.0010	Beban Penyusutan Jalan-Jalan Lainnya			0.00
8.1.08.03.01.0015	Beban Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa			0.00
8.1.08.03.01.0019	Beban Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus			0.00
8.1.08.03.01.0020	Beban Penyusutan Jembatan-Jembatan Penyeberangan			0.00
8.1.08.03.01.0021	Beban Penyusutan Jembatan-Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal			0.00
8.1.08.03.01.0023	Beban Penyusutan Jembatan-Jembatan Lainnya			0.00
8.1.08.03.02	Beban Penyusutan Bangunan Air	0.00		0.00
8.1.08.03.02.0001	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi			0.00
8.1.08.03.02.0002	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi			0.00
8.1.08.03.02.0003	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi			0.00
8.1.08.03.02.0004	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi			0.00
8.1.08.03.02.0006	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi			0.00
8.1.08.03.02.0009	Beban Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Waduk Pasang Surut			0.00
8.1.08.03.02.0012	Beban Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut			0.00
8.1.08.03.02.0013	Beban Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang Surut			0.00
8.1.08.03.02.0017	Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Waduk Pengembangan Rawa			0.00
8.1.08.03.02.0025	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan			0.00
8.1.08.03.02.0028	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai			0.00
8.1.08.03.02.0029	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai			0.00
8.1.08.03.02.0030	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai			0.00
8.1.08.03.02.0033	Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air			0.00
8.1.08.03.02.0034	Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air			0.00

8.1.08.03.02.0036	Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air			0.00
8.1.08.03.02.0037	Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air			0.00
8.1.08.03.02.0040	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku			0.00
8.1.08.03.02.0044	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku			0.00
8.1.08.03.02.0045	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya			0.00
8.1.08.03.02.0050	Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor			0.00
8.1.08.03.03	Beban Penyusutan Instalasi		0.00	0.00
8.1.08.03.03.0001	Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan			0.00
8.1.08.03.03.0002	Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air			0.00
8.1.08.03.03.0004	Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dangkal			0.00
8.1.08.03.03.0005	Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya			0.00
8.1.08.03.03.0006	Beban Penyusutan Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik			0.00
8.1.08.03.03.0012	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah			0.00
8.1.08.03.03.0018	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)			0.00
8.1.08.03.03.0019	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)			0.00
8.1.08.03.03.0023	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)			0.00
8.1.08.03.03.0026	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)			0.00
8.1.08.03.03.0029	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya			0.00
8.1.08.03.03.0030	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk			0.00
8.1.08.03.03.0031	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi			0.00
8.1.08.03.03.0032	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik			0.00
8.1.08.03.03.0034	Beban Penyusutan Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan di Darat			0.00
8.1.08.03.03.0037	Beban Penyusutan Instalasi Gas-Instalasi Jaringan Pipa Gas			0.00
8.1.08.03.03.0044	Beban Penyusutan Instalasi Lain-Instalasi Lain			0.00
8.1.08.03.04	Beban Penyusutan Jaringan		0.00	354,688.00
8.1.08.03.04.0001	Beban Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa			0.00
8.1.08.03.04.0003	Beban Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi			0.00
8.1.08.03.04.0004	Beban Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah			0.00
8.1.08.03.04.0005	Beban Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya			0.00
8.1.08.03.04.0006	Beban Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi			0.00
8.1.08.03.04.0007	Beban Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	354688		354,688.00
8.1.08.03.04.0008	Beban Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya			0.00
8.1.08.03.04.0009	Beban Penyusutan Jaringan Telepon-Jaringan Telepon diatas Tanah			0.00
8.1.08.03.04.0015	Beban Penyusutan Jaringan Gas-Jaringan Pipa Distribusi			0.00
8.1.08.09	Beban Penyusutan Properti Investasi		0.00	0.00
8.1.08.09.01	Beban Penyusutan Properti Investasi Gedung dan Bangunan		0.00	0.00
8.1.08.09.01.0001	Beban Penyusutan Properti Investasi Bangunan Gedung			0.00
	JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi		0.00	102,158,886.00
				0.00
8.3	BEBAN TRANSFER		0.00	0.00
8.3.01	Beban Bagi Hasil		0.00	0.00
8.3.01.01	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Kota		0.00	0.00
8.3.01.01.03	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa		0.00	0.00
8.3.01.01.03.0001	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa			0.00
8.3.01.02	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah		0.00	0.00
8.3.01.02.01	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah		0.00	0.00
8.3.01.02.01.0001	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa			0.00
8.3.02	Beban Bantuan Keuangan		0.00	0.00
8.3.02.05	Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa		0.00	0.00
8.3.02.05.01	Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota		0.00	0.00
8.3.02.05.01.0003	Beban Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa			0.00
8.3.02.05.02	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota		0.00	0.00
8.3.02.05.02.0003	Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa			0.00
	JUMLAH BEBAN TRANSFER		0.00	0.00
				0.00
8.2	BEBAN TIDAK TERDUGA		0.00	0.00
8.2.01	Beban Tidak Terduga		0.00	0.00
8.2.01.01	Beban Tidak Terduga		0.00	0.00
8.2.01.01.01	Beban Tidak Terduga		0.00	0.00
8.2.01.01.01.0001	Beban Tidak Terduga			0.00
	JUMLAH BEBAN TIDAK TERDUGA		0.00	0.00
	JUMLAH BEBAN	2,835,900,030.83		2,937,720,418.83
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	-2,835,900,030.83		-2,937,720,418.83
				0
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
7.4	SURPLUS NON OPERASIONAL-LO		0.00	0.00
7.4.03	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO		0.00	0.00
7.4.03.01	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO		0.00	0.00
7.4.03.01.01	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO		0.00	0.00
7.4.03.01.01.0001	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO			0.00
	JUMLAH SURPLUS NON OPERASIONAL-LO		0.00	0.00
				0
8.4	DEFISIT NON OPERASIONAL-LO		0.00	0.00
8.4.03	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO		0.00	0.00
8.4.03.01	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO		0.00	0.00
8.4.03.01.01	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO		0.00	0.00
8.4.03.01.01.0001	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO			0.00
	JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL-LO		0.00	0.00
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		0.00	0.00
				0
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	-2,835,900,030.83		-2,937,720,418.83
				-64308960
POS LUAR BIASA				0

8.5	BEBAN LUAR BIASA	0		0
	JUMLAH BEBAN LUAR BIASA	0		0
	SURPLUS/DEFISIT-LO	-2,835,900,030.83		-2,937,720,418.83



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KANTOR CAMAT JANAPRIA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2024 dan 31 DESEMBER 2023

NO	Uraian	LPE 2024	PENYESUAIAN		LPE 2023
			D	K	
1	EKUITAS AWAL	9,196,294,304.00			9,249,616,818.00
2	SURPLUS/(DEFISIT)-LO	(2,937,720,418.83)			(2,870,170,488.00)
3	RK PPKD	2,942,255,350.83		2,942,255,350.83	2,816,847,974.00
4	RK SKPD				
5	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	-			-
5.1	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-			-
	Persediaan Bahan Pakai Habis	-			
	Persediaan Bahan/ Material	-			
	Persediaan Barang Lainnya	-			
5.2	KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	-			-
	Koreksi Nilai Aset Tetap	-			-
	Tanah	-			
	Peralatan dan Mesin	-			
	Gedung dan Bangunan	-			
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-			-
	Aset Tetap Lainnya	-			
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-			-
	Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-			-
	Peralatan dan Mesin	-			
	Gedung dan Bangunan	-			
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-			-
	Akumulasi Penyusutan	-			-
5.2	LAIN-LAIN	-			-
	Koreksi Nilai Kas	-			-
	Kas di Kas Daerah	-			
	Kas di Bendahara Penerimaan	-			
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-			
	Kas di BLUD	-			
	kas lainnya	-			
	Setara Kas	-			
	Kas di Bendahara Puskesmas (FKTP)	-			
	Kas di Bendahara BOS	-			
	Koreksi Nilai Piutang	-			-
	Piutang Pajak	-			
	Penyisihan Piutang Pajak	-			
	Piutang Retribusi	-			
	Penyisihan Piutang Retribusi	-			
	Piutang Hasil Pengelolaan Kekay Daerah	-			
	Piutang Lain2 PAD	-			
	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD	-			
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-			
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-			
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Annsuran	-			
	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Annsuran	-			

	Piutang TGR	-			
	Penyisihan Piutang TGR	-			
	Piutang Lain-lain Lainnya	-			
	Penyisihan Piutang Lain-lain Lainnya	-			
	Koreksi Nilai Beban Dibayar Dimuka	-			-
	Jasa dibayar dimuka	-			
	Barang dibayar dimuka	-			

	Koreksi Nilai Investasi	-			-
	Investasi Permanen	-			
	Investasi Nonpermanen	-			
	Penyisihan Investasi Non Permanen	-			
	Koreksi Nilai Aset Lainnya	-			-
	Tagihan Jangka Panjang -TGR	-			
	Penyisihan TGR	-			
	Kemitraan dengan Pihak III	-			
	Aset Tidak Berwujud	-			
	Aset dalam proses TGR	-			
	aset rusak berat	-			
	Akumulasi penyusutan	-			
	Koreksi Nilai Kewajiban	-			-
	Utang PFK	-			
	Utang Bunga	-			
	Bagian Utang Jangka Panjang	-			
	Pendapatan diterima dimuka	-			
	Utang Barang dan Jasa	-			
	Utang Belanja Pegawai	-			
	Utang Belanja Modal	-			
	Utang bansos	-			
	Utang Transfer	-			
	Bagian Lancar Utang Jk Pjg	-			
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-			
	Koreksi Nilai Aset Non APBD				
6	EKUITAS AKHIR	9,200,829,236.00			9,196,294,304.00

BERITA ACARA REKONSILIASI

Pada hari ini Kamis tanggal Enam Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua puluh Lima telah disenggarakan Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan perubahan Ekuitas dan Neraca antara Satuan Kerja Perangkat Daerah Kantor Camat Janapria yang selanjutnya disebut pengguna Anggaran, dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) selaku SKPKD, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Daerah/PPKD. Pengguna Anggaran telah menyampaikan laporan/data sebagai bahan rekonsiliasi, berupa:

1. Laporan Realisasi Anggaran Sampai Dengan Bulan Desember Tahun Anggaran 2024
2. Laporan Operasional Sampai Dengan Bulan Desember Tahun Anggaran 2024
3. Laporan Perubahan Ekuitas Per Tanggal 31 Desember 2024
4. Neraca Per Tanggal 31 Desember 2024
5. Laporan Perubahan SAL (Khusus BLUD) Per Tanggal 31 Desember 2024
6. Laporan Arus Kas (Khusus BLUD) Per Tanggal 31 Desember 2024

Selanjutnya Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Selaku SKPKD menyediakan data transaksi dan laporan terkait yang diproses berdasarkan SP2D/STS dan bukti transaksi keuangan lainnya yang disampaikan oleh Pengguna Anggaran. Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi ini dengan dilampiri Laporan Hasil Rekonsiliasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini. Kesalahan / ketidakcocokkan data yang tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi, akan dijadikan dasar perbaikan terhadap data dan laporan keuangan di kedua belah pihak.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dilaksanakan.


a.n. Kepala BKAD Selaku SKPKD
Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan

WIDYA ASTUTI SE.M.Si
NIP: 19750302 200003 2 006


Camat Janapria

LALU MARZAWAN SUPRIYADI, S.Sos
NIP. 197102251994021002

PEMERINTAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
LAPORAN HASIL REKONSILIASI LRA
BULAN DESEMBER
TAHUN ANGGARAN 2024

No Urut	Uraian / Rincian Pos-pos LRA	LRA Menurut		Selisih	Koreksi Selisih +/-		LRA Rekonsiliasi
		SKPKD	SKPD		SKPKD	SKPD	
1	2	3	4	5 = 3-4	6	7	8 = 4+7
4	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	-	-	-
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	-	-
4.1.02	Retribusi Daerah	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-	-	-
5	BELANJA DAERAH	2.942.255.350,83	2.942.255.350,83	-	-	-	2.942.255.350,83
5.1	BELANJA OPERASI	2.835.900.030,83	2.835.900.030,83	-	-	-	2.835.900.030,83
5.1.01	Belanja Pegawai	2.091.994.627	2.091.994.627	-	-	-	2.091.994.627
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	743.905.403,83	743.905.403,83	-	-	-	743.905.403,83
	JUMLAH BELANJA OPERASI	2.835.900.030,83	2.835.900.030,83	-	-	-	2.835.900.030,83
5.2	BELANJA MODAL	106.355.320	106.355.320	-	-	-	106.355.320
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	104.838.320	104.838.320	-	-	-	104.838.320
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.517.000	1.517.000	-	-	-	1.517.000
	JUMLAH BELANJA	2.942.255.350,83	2.942.255.350,83	-	-	-	2.942.255.350,83
	SURPLUS/DEFISIT	(2.942.255.350,83)	(2.942.255.350,83)				(2.942.255.350,83)



a.n. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan *h*

WIDYA ASTUTI SE.M.Si
 NIP: 19750302 200003 2 006

Janapria, 16 Januari 2025
 PLT Camat Janapria



LALU MARZAWAN SUPRIYADI, S.Sos
 NIP: 197102251994021002

PEMERINTAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
LAPORAN HASIL REKONSILIASI NERACA
BULAN DESEMBER
TAHUN ANGGARAN 2024

No Urut	Uraian / Rincian Pos-Pos	NERACA Menurut		Selisih	Koreksi Selisih +/-		NERACA
	Neraca	SKPKD	SKPD		SKPKD	SKPD	Rekonsiliasi
1	2	3	4	5 = 3-4	6	7	8 = 4+7
1	ASET	9.249.026.346	9.249.026.346	-			9.249.026.346
1.1	ASET LANCAR	353.000	353.000	-			353.000
1.1.04	Piutang Retribusi	-	-	-			-
1.1.06	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	-	-	-			-
1.1.10	Penyisihan Piutang	-	-	-			-
1.1.12	Persediaan	353.000	353.000	-			353.000
1.3	ASET TETAP	9.234.126.786	9.234.126.786	-			9.234.126.786
1.3.01	Tanah	8.266.952.000	8.266.952.000	-			8.266.952.000
1.3.02	Peralatan dan Mesin	1.038.947.770	1.038.947.770	-			1.038.947.770
1.3.07.01	Akm peny peralatan dan mesin	(874,817,681)	(874,817,681)	-			(874,817,681)
1.3.03	Gedung dan Bangunan	1.257.173.000	1.257.173.000	-			1.257.173.000
1.3.07.02	Akm peny gedung dan bangunan	(465,192,305.00)	(465,192,305.00)	-			(465,192,305.00)
1.3.04	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	15.704.500	15.704.500	-			15.704.500
1.3.07.03	Akm peny Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(4,640,498.00)	(4,640,498.00)	-			(4,640,498.00)
1.5	ASET LAINNYA			-			
1.5.04	Aset Lain-lain	14.546.560	14.546.560	-			14.546.560

2	KEWAJIBAN	48.197.110	48.197.110	-			48.197.110
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	48.197.110	48.197.110	-			48.197.110
2.1.05	Pendapatan diterima dimuka	-	-	-			-
2.1.06	Utang Belanja	48.197.110	48.197.110	-			48.197.110
				-			
	TOTAL EKUITAS	9.200.829.236	9.200.829.236	-			9.200.829.236
	TOTAL KEWAJIBAN & EKUITAS DANA	9.249.026.346	9.249.026.346	-			9.249.026.346
	Jumlah	9.249.026.346	9.249.026.346				9.249.026.346



an. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan *hu*

WIDYA ASTUTI SE.M.Si
NIP: 19750302 200003 2 006

Janapria, 16 Januari 2025
PLT Camat Janapria



LALU WARZAWAN SUPRIYADI, S.Sos
NIP: 197102251994021002

PEMERINTAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
LAPORAN HASIL REKONSILIASI LAPORAN OPERASIONAL
BULAN DESEMBER
TAHUN ANGGARAN 2024

No Urut	Uraian / Rincian Pos-Pos	LO Menurut		Selisih	Koreksi Selisih +/-		LO
		SKPKD	SKPD		SKPKD	SKPD	Rekonsiliasi
	LO	3	4	5 = 3-4	6	7	8 = 4+7
7	PENDAPATAN	-	-	-	-	-	-
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	-	-	-	-	-	-
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	-	-	-	-	-	-
8	BEBAN	2.937.720.418,83	2.937.720.418,83	-	-	-	2.937.720.418,83
8.1	BEBAN OPERASI	2.937.720.418,83	2.937.720.418,83	-	-	-	2.937.720.418,83
8.1.01	Beban Pegawai	2.091.167.393	2.091.167.393	-	-	-	2.091.167.393
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	744.394.139,83	744.394.139,83	-	-	-	744.394.139,83
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	102.158.886	102.158.886	-	-	-	102.158.886
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	-2.937.720.418,83	-2.937.720.418,83	-	-	-	-2.937.720.418,83
7.4	SURPLUS NON OPERASIONAL-LO	-	-	-	-	-	-
7.4.03	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	-	-	-	-	-	-
	SURPLUS/DEFISIT-LO	-2.937.720.418,83	-2.937.720.418,83	-	-	-	-2.937.720.418,83
	Jumlah						

Janapria, 16 Januari 2025
 PLT Camat Janapria

a.n. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan 2



WIDYA ASTUTI SE.M.Si
 NIP: 19750302 200003 2 006



KALU MARZAWAN SUPRIYADI, S.Sos
 NIP: 197102251994021002

PEMERINTAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
LAPORAN HASIL REKONSILIASI LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BULAN DESEMBER
TAHUN ANGGARAN 2024

No Urut	Uraian / Rincian Pos-Pos	LO Menurut		Selisih	Koreksi Selisih +/-)		LPE
	LPE	SKPKD	SKPD		SKPKD	SKPD	Rekonsiliasi
1	2	3	4	5 = 3-4	6	7	8 = 4+7
	EKUITAS AWAL	9.196.294.304	9.196.294.304	-	-	-	9.196.294.304
	SURPLUS/(DEFISIT)-LO	-2.937.720.418,83	-2.937.720.418,83	-	-	-	-2.937.720.418,83
	RK PPKD	2.942.255.350,83	2.942.255.350,83	-	-	-	2.942.255.350,83
	EKUITAS AKHIR	9.200.829.236	9.200.829.236	-	-	-	9.200.829.236
	Jumlah						



a.n. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan

WIDYA ASTUTI SE.M.Si
NIP: 19750302 200003 2 006

Janapria, 16 Januari 2025
 PLT Camat Janapria



BALU MARZAWAN SUPRIYADI, S.Sos
NIP: 197102251994021002



015200108 015 10152 31/12/2024
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KANTOR CAMAT JANAPRIA
SURAT TANDA SETORAN
(STS)

STS No. 0004/STS/JNP/2024

Bank : Bank NTB Syariah
No. Rekening : 003.21.00706.00-0

Harap diterima uang : Rp 33.276.067
(dengan huruf) Tiga puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Enam puluh Tujuh rupiah

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut :

NO.	KODE REKENING	URAIAN RINCIAN OBYEK	JUMLAH
1		Setoran sisa penggunaan UP bendahara Kantor Camat Janapria tahun 2024	Rp 33.276.067
JUMLAH :			Rp33.276.067,00

Uang tersebut diterima pada tanggal 31 Desember 2024



Bendahara Pengetuaaran
[Signature]
LALU MUHAMAD RAMLI
NIP. 19691231 201001 1 026



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KANTOR CAMAT JANAPRIA
SURAT TANDA SETORAN
(STS)

STS No. 0003/STS/JNP/2024

Bank : Bank NTB Syariah
No. Rekening : 003.21.00706.00-0

Harap diterima uang : Rp 2.771.216
(dengan huruf) Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus enam belas rupiah

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut :

NO.	KODE REKENING	URAIAN RINCIAN OBYEK	JUMLAH
1		Kelebihan pembayaran tunjangan anak terlanjur pembayaran anak terhitung Desember 2023 s/d Desember 2024 Kecamatan Janapria 2024 An. Syamsun Rijal, S.IP Tunjangan anak Rp. 1,580,686.230, Tunjangan Beras Rp. 1,013,860	Rp 2.771.216
JUMLAH :			Rp2.771.216,00

Uang tersebut diterima pada tanggal 16 Desember 2024



Bendahara Pengeluaran,

LALU MUHAMAD RAMLI
NIP. 19691231 201601 1 030



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KANTOR CAMAT JANAPRIA
SURAT TANDA SETORAN
(STS)

STS No. 0002/STS/JNP/2024

Bank : Bank NTB Syariah
No. Rekening : 003.21.00706.00-0

Harap diterima uang : Rp 327.000
(dengan huruf) Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut :

NO:	KODE REKENING	URAIAN RINCIAN OBYEK *	JUMLAH (Rp.)
1		Pengembalian pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional dari tanggal 05 juni s/d 03 Agustus An. Lalu Suparlan Kantor Camat Janapria	Rp 327.000
JUMLAH :			Rp327.000,00

Uang tersebut diterima pada tanggal 07 Mei 2024



Bendahara Pengeluaran,

[Signature]
LALU MUHAMMAD RAMLI
NIP. 19691231 201001 1 030



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KANTOR CAMAT JANAPRIA

SURAT TANDA SETORAN

(SIS)

STS No. 0001/STS/JNP/2024

Bank : Bank NTB Syariah
No. Rekening : 003.21.00706.00-0

Harap diterima uang : Rp 5.523.200
(dengan huruf) Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut :

NO.	KODE REKENING	URAIAN RINCIAN OBYEK	JUMLAH (Rp.)
		Pengembalian pembayaran Gaji Bulan Januari An. Satar SH Kantor Camat Janapria	Rp 5.523.200
JUMLAH :			Rp5.523.200,00

Uang tersebut diterima pada tanggal 15 Januari 2024

MENGETAHUI
Camat Janapria
SYAMSULRIJAL S.P
NIP. 196612311986071014

Bendahara Pengeluaran

LALI MURNAMAU RAMLI
NIP. 19601231 201001 1000

No. _____

Telah terima dari

Bendahara Kantor Camat Jempura

Uang sejumlah

Delapan Ratus Sembilan puluh Ribu Rupiah

Untuk pembayaran

Bayar iuran wifi bulas Desember 2024.

31/12-2024 fs Mervina

Terbilang Rp.

890.000,-

SLASH.NET
Support Every Your Business





PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KECAMATAN JANAPRIA

Jln. Raya Janapria Montong Gamang - Ganti Km.09 Kode Pos 83554

BERITA ACARA PEMERIKSAAN STOCK OPNAME BARANG

Nomor : 028 / / JPR / 2024

Pada hari ini **Selasa** tanggal **tiga puluh satu** bulan **Desember** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : SYAMSUN RIJAL, S.IP
Jabatan : Camat Janapria

sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, kami melakukan pemeriksaan persediaan barang habis pakai kepada :

Nama Lengkap : RAHMAN
Jabatan : Pengurus Barang pada Kantor Camat Janapria

berdasarkan hasil pemeriksaan barang serta bukti-bukti yang berada dalam pengurusan itu, kami menemui kenyataan sebagai berikut :

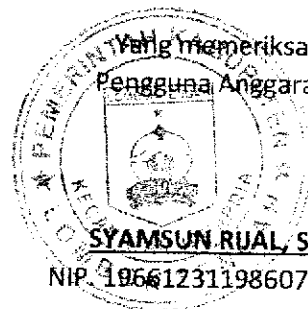
No.	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	KERTAS A4	1	Rim	55,000	55,000
2	Tinta Epson Original 70 ml Hitam	1	Botol	149,000	149,000
3	Tinta Epson Original 70 ml Biru	1	Botol	149,000	149,000
Jumlah					353,000

Janapria, 31 Desember 2024

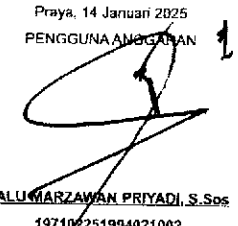
Pengurus Barang,

RAHMAN

NIP. 197812312007011092



PEMERINTAH KAB. LOMBOK TENGAH
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
LANGSUNG (LS)

<p align="center">Tahun Anggaran: 2025</p> <p>KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KAB. LOMBOK TENGAH</p> <p>Supaya menerbitkan SP2D kepada:</p> <p>Nama SKPD : Kantor Camat Janapria Nama Unit SKPD : Kantor Camat Janapria Nama : Terlampir No. Rekening Bank : Terlampir Nama di Rekening Bank : Terlampir Nama Bank - Cabang : Terlampir NPWP : Terlampir Dasar Pembayaran : 52.02/01.0/000001/7.01.7.01.0.00.07.0000/M/1/2025</p> <p>Untuk Keperluan: Pembayaran TPP Bulan Desember Tahun 2024 (PAD) PNS Kantor Camat Janapria</p> <p>Pembebanan Pada:</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:20%;">KODE REKENING</th> <th style="width:50%;">URAIAN</th> <th style="width:30%;">NILAI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">NOMOR SPD: 52.02/01.0/000001/7.01.7.01.0.00.07.0000/M/1/2025</td> </tr> <tr> <td>7.01.01.2.02</td> <td>- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7.01.01.2.02.0001</td> <td>- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.1.01.02.01.0001</td> <td>Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS</td> <td align="right">Rp47.307.110,00</td> </tr> <tr> <td align="right" colspan="2">Jumlah</td> <td align="right">Rp47.307.110,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Jumlah SPP Diminta Rp47.307.110,00</p> <p>Nomor dan Tanggal SPP : 52.02/02.0/000003A.S/7.01.7.01.0.00.07.0000/M/1/2025, tanggal 14 Januari 2025</p>	KODE REKENING	URAIAN	NILAI	NOMOR SPD: 52.02/01.0/000001/7.01.7.01.0.00.07.0000/M/1/2025			7.01.01.2.02	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		7.01.01.2.02.0001	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	Rp47.307.110,00	Jumlah		Rp47.307.110,00	<p align="center">Nomor SPM: 52.02/03.0/000003/LS/7.01.7.01.0.00.07.0000/M/1/2025</p> <p>Potongan-Potongan:</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:5%;">No.</th> <th style="width:65%;">Uraian</th> <th style="width:10%;">ID Billing</th> <th style="width:20%;">Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PPH 21</td> <td></td> <td align="right">Rp3.480.085,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Iuran Wajib Pegawai 8%</td> <td></td> <td align="right">Rp0,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Iuran Jaminan Kesehatan 4%</td> <td></td> <td align="right">Rp0,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja</td> <td></td> <td align="right">Rp0,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Iuran Jaminan Kematian</td> <td></td> <td align="right">Rp0,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Iuran Wajib Pegawai 1%</td> <td></td> <td align="right">Rp1.404.585,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Taperum</td> <td></td> <td align="right">Rp0,00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Beras (BULOG)</td> <td></td> <td align="right">Rp0,00</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Zakat</td> <td></td> <td align="right">Rp0,00</td> </tr> <tr> <td align="right" colspan="3">Jumlah</td> <td align="right">Rp4.884.670,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>SPM Yang Dibayarkan</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Jumlah Yang Diminta (Bruto)</td> <td align="right">Rp47.307.110,00</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Potongan</td> <td align="right">Rp4.884.670,00</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Netto</td> <td align="right">Rp42.422.440,00</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Yang Dibayarkan</td> <td align="right">Rp47.307.110,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Uang Sejumlah: (Empat puluh tujuh juta tiga ratus tujuh ribu seratus sepuluh rupiah)</p> <p align="right">Praya, 14 Januari 2025 PENGUNA ANGGARAN</p> <p align="right"> LALU MARZAWAN PRIYADI, S.Sos 197102251994021002</p>	No.	Uraian	ID Billing	Jumlah	1	PPH 21		Rp3.480.085,00	2	Iuran Wajib Pegawai 8%		Rp0,00	3	Iuran Jaminan Kesehatan 4%		Rp0,00	4	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja		Rp0,00	5	Iuran Jaminan Kematian		Rp0,00	6	Iuran Wajib Pegawai 1%		Rp1.404.585,00	7	Taperum		Rp0,00	8	Beras (BULOG)		Rp0,00	9	Zakat		Rp0,00	Jumlah			Rp4.884.670,00	Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp47.307.110,00	Jumlah Potongan	Rp4.884.670,00	Jumlah Netto	Rp42.422.440,00	Jumlah Yang Dibayarkan	Rp47.307.110,00
KODE REKENING	URAIAN	NILAI																																																																					
NOMOR SPD: 52.02/01.0/000001/7.01.7.01.0.00.07.0000/M/1/2025																																																																							
7.01.01.2.02	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																																																																						
7.01.01.2.02.0001	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																																																																						
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	Rp47.307.110,00																																																																					
Jumlah		Rp47.307.110,00																																																																					
No.	Uraian	ID Billing	Jumlah																																																																				
1	PPH 21		Rp3.480.085,00																																																																				
2	Iuran Wajib Pegawai 8%		Rp0,00																																																																				
3	Iuran Jaminan Kesehatan 4%		Rp0,00																																																																				
4	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja		Rp0,00																																																																				
5	Iuran Jaminan Kematian		Rp0,00																																																																				
6	Iuran Wajib Pegawai 1%		Rp1.404.585,00																																																																				
7	Taperum		Rp0,00																																																																				
8	Beras (BULOG)		Rp0,00																																																																				
9	Zakat		Rp0,00																																																																				
Jumlah			Rp4.884.670,00																																																																				
Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp47.307.110,00																																																																						
Jumlah Potongan	Rp4.884.670,00																																																																						
Jumlah Netto	Rp42.422.440,00																																																																						
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp47.307.110,00																																																																						

SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Pengguna Anggaran